



**PERANAN DIPLOMASI PUBLIK TERHADAP PENYELESAIAN
KONFLIK JEPANG - CINA**



UPT PEP. UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	26-7-2007
Asal Dari	Fale-508906
Banyaknya	1 (satu) es
Kategori	H
Daftar	42/26-27
Kelembagaan	

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Ahmad Daeng Coba
Nim : E 131 03 741 - 2
Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

**JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ahmad Daeng Coba
No. Pokok : E 131 03 74-2
Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Peranan Diplomasi Publik Terhadap Penyelesaian Konflik
Jepang-Cina

Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Akhir Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2007

Pembimbing I


Drs. Aspiannor Masrie
NIP. 131 992 457

Pembimbing II


Seniwati S. Sos. M. Hum
NIP. 132 288 621

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Armin Arsvad, M.Si.
NIP. 131 961 985



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

**PERANAN DIPLOMASI PUBLIK TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK
JEPANG - CINA**

NAMA : AHMAD DAENG COBA
N I M : E 131 03 741-2
JURUSAN : POLITIK PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada hari Sabtu, 27 Januari 2007.

Tim Evaluasi

Ketua : Drs. Andi Ya'kub, M.Si
Sekretaris : Ishak Rahman, S.IP
Anggota : 1. Drs. Aspiannoer Masrie
2. Seniwati, S.Sos., M.Hum.
3. Agussalim, S.IP., MIRAP

ABSTRAK

Ahmad Daeng Coba

E 131 03 741-2

Peranan Diplomasi Publik Terhadap Penyelesaian Konflik Jepang – Cina

Pembimbing I: Drs. Aspiannor Masrie , Pembimbing II:

Seniwati.S.Sos.M.Hum

ix + 72 Halaman

Daftar Pustaka: 16 buku, 20 lain-lain (Jurnal, Majalah, Koran, dan Website)

Tulisan ini bertujuan, *pertama*, untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh reduksi catatan sejarah Jepang terhadap hubungan Jepang – Cina, *kedua* untuk mengetahui penyelesaian konflik kedua negara melalui jalan diplomasi publik yang dinilai mampu menyelesaikan konflik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik telaah pustaka (*library research*) yaitu dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan, berupa: buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan website yang merupakan data valid. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif sedangkan data kuantitatif yang bersifat kualitatif memperkuat analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hubungan Jepang – Cina mengalami kemunduran sejak peluncuran buku sejarah Jepang yang berjudul *A Common Book on the History of East Asian Countries* yang dinilai oleh masyarakat Cina sebagai bentuk kebohongan publik. Lawatan PM Jepang sebanyak enam kali selama masa pemerintahannya tersebut telah membangkitkan kenangan pahit warga Cina atas militerisme Jepang masa lalu, karena bagi Cina, Kuil Yasukuni dianggap sebagai lambang kekejaman militer Jepang di masa lalu yang telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Cina. Hubungan Jepang – Cina kemudian mencapai klimaks ketika masyarakat Cina meminta Jepang tidak menutupi kekejaman tentara Jepang di masa lalu. Namun, oleh beberapa kalangan penerbitan buku tersebut yang kini telah masuk ke bangku-bangku sekolah, dinilai tidak etis dan dapat mengganggu perkembangan mental anak-anak Jepang. Konflik ini kemudian terus berkembang, hingga kemudian oleh kedua negara menganggap perlu adanya solusi yang tepat dalam penyelesaian konflik tersebut. Diplomasi publik yang diterapkan kedua negara tersebut merupakan langkah bijak, karena selain menyangkut masyarakat Cina sebagai korban, juga diperlukan permintaan maaf dari Jepang bagi seluruh masyarakat Cina terhadap kesalahan di masa lalu.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat, salam sejahtera, rahmat dan nikmat dari Allah mudah-mudahan selalu tercurah kepada Baginda Maulana Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mukhlis yang telah memberikan karya khayali dan cahaya kemaslahatan bagi mereka yang berilmu.

Skripsi ini ditulis mengingat Jepang dan Cina merupakan dua kekuatan besar di Asia baik dari segi militer maupun dari segi ekonomi dan budaya. Dengan adanya konflik menyusul terbitnya buku catatan sejarah di Jepang yang oleh Cina dianggap sebagai bentuk kebohongan publik terhadap catatan sejarah masa lalu, Maka diperlukan solusi yang tepat dalam menangani masalah tersebut. Diplomasi publik terhadap penyelesaian kasus ini merupakan solusi yang tepat karena hal ini menyangkut masyarakat suatu negara, maka diperlukan juga solusi publik terhadap penyelesaian kasus tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi penulis yang mendalam, maka perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin

2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
3. Bapak Drs. Aspiannor Masrie selaku pembimbing I
4. Ibu Seniwati.S.Sos.M.Hum selaku pembimbing II
5. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta staf akademik Reguler Sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
6. Kedua orang tua, Alm. Baso Ambong dan Lucia Dos Reis Dias Quintas yang selalu memberikan nasehat, restu, dan dukungan.
7. Buat yang terkasih Sinyorita Evy Julita S.Pt, makasi atas segala perhatianmu selama ini.
8. *Sohib arisan mingguan*, Ikhsan Basyir, Muh. Sabir, Ardi Botak, Rei, Risto, Ririn Bondeng, Indun Dg ke'nang, Santy Oneng, Nur Ikhsan, Deviani Muda De Esperansa, Dan seluruh teman-teman HI.
9. Sahabatku, Awal Bolonk, Zainal Abbas, Ilmal Cabul, Rusdi Mulut, *always remember our act and never say Good Bye...*
10. Sundal Bolonk Crew, Anca (makasi Komputernya), Ulla, Aka, Aan, Hadi Bla, Codet, Jala, Ecel Marly, Yasir, Rahmat Buntu, Cida, Endang, Basrul Haq, Amir Jempol,
11. Casablanca Crew, Pai Kopasus, Iwan syahrana, Assing ramping, Nyonk, Wangky, Asrul, De2, Tigor, Atmo, Antu, Anto Narji.

12. kepada seluruh pihak, teman, dan kerabat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan do'anya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis terbuka atas segala kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis pribadi khususnya dan rekan-rekan mahasiswa FISIP UNHAS pada umumnya, serta kepada pembaca budiman.

Makassar, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Diplomasi Publik	13
B. Kerjasama Bilateral dalam Kerangka Hubungan Internasional ...	18
C. Konflik dan Penyelesaian Konflik	22
BAB III GAMBARAN UMUM HUBUNGAN JEPANG - CINA	
A. Diplomasi publik Jepang – Cina	35
B. Konflik Jepang - Cina	37
C. Hubungan Jepang – Cina di Tengah Reduksi Catatan Sejarah	45

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Pengaruh Reduksi Catatan Sejarah Jepang Terhadap Hubungan Jepang – Cina	52
B. Peranan Diplomasi Publik Terhadap Penyelesaian Konflik Jepang – Cina	61
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diplomasi merupakan bagian yang sangat penting dalam studi ilmu hubungan internasional, dimana studi hubungan internasional yang esensial ialah yang mengkaji dan menelaah fenomena-fenomena internasional. Dalam hal ini, interaksi-interaksi yang terjadi antara dua atau lebih aktor hubungan internasional yang tidak akan terlepas dari peran diplomasi. Aktor-aktor hubungan internasional, utamanya aktor negara akan selalu mengedepankan upaya-upaya nyata yang signifikan dalam dalam rangka pencapaian tujuan dan kepentingan nasionalnya.

Diplomasi ditujukan untuk turut menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Di lain pihak, diplomasi yang dilakukan berusaha untuk meng-eliminir akibat-akibat dari adanya perbedaan-perbedaan tujuan dan kepentingan masing-masing aktor hubungan internasional yang mana dapat mengancam suasana damai yang menjadi salah satu tujuan diplomasi. Perbedaan-perbedaan yang menyangkut ideologi, politik, sosial budaya, keamanan maupun ekonomi akan berakses pada pecahnya konflik.

Terlepas dari hal di atas, diplomasi merupakan produk suatu negara yang keberadaannya tidak muncul begitu saja. Diplomasi sangat terkait akan negara atau pemerintah yang berkuasa, kebijakan politik luar negeri, kebijakan dalam



negeri, maupun tatanan dunia yang menjadi latarnya. Oleh karena itu, diplomasi dapat dinilai efektif apabila sasaran dari tujuan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai dan di pertahankan dapat terpenuhi dengan meminimalkan konsekuensi buruk yang dapat timbul dari usaha-usaha pencapaian sasaran tersebut.

Sementara itu, interaksi hubungan antara negara yang berada dalam suatu tatanan sistem interaksi internasional, hubungan tersebut menurut dimensi waktu dan ruang yang dibentuk oleh faktor nyata seperti geografis, dan faktor yang tidak nyata seperti citra pengalaman masa lalu. Pada pasca berakhirnya perang dunia ke-II, negara-negara yang telah terlepas dari penjajahan telah memulai untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Hal tersebut dikarenakan adanya keinginan untuk memperbaiki segala aspek dalam negara yang tidak berfungsi akibat dari penerapan sistem pemerintahan kolonial yang ingin menerapkan pada negara bekas jajahan mereka.

Dalam melaksanakan hubungan bilateral tersebut dibutuhkan sebuah keadaan yang saling percaya dan sebuah kondisi yang aman demi terciptanya sebuah hasil yang sangat memuaskan. Tetapi, Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi keamanan dalam negeri yang wajib tercipta, baik itu stabilitas politik, ekonomi, maupun sosial budaya karena hal tersebut merupakan cerminan dalam melakukan sebuah kerjasama bilateral dan merupakan sebuah aset yang menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Seperti halnya dengan

hubungan bilateral antara dua negara raksasa ekonomi Asia yaitu Jepang dan Cina. Hubungan mereka terpaksa sedikit mendapat batu sandungan yang diakibatkan oleh citra pengalaman masa lalu.

Hubungan kerjasama bilateral antara Jepang dan Cina belakangan ini banyak menemui hambatan yang sangat berarti dan mendapat perhatian yang ekstra dari kedua negara. Berbagai kasus dan insiden anti Jepang yang terjadi di Cina menjadi indikator bahwa ada hal-hal yang sangat mendasar dan pernah dilakukan oleh Jepang pada masa lalu. Masa perang dunia ke-II, Jepang adalah raksasa Asia yang hampir menguasai seluruh kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur Raya, selain itu Jepang merupakan penjajah yang sangat kejam dengan perlakuannya kepada jajahannya.

Cina merupakan salah satu negara jajahan yang pernah merasakan kekejaman Jepang pada masa tersebut. Banyak peristiwa yang tragis terjadi seperti, kasus pemerkosaan Nanking (*The Rape Of Nanjing*) dimana ada 30.000 jiwa penduduk yang menjadi korban dan seluruh infrastruktur kota di bumi hanguskan oleh bala tentara Jepang.

Belakangan ini, ketika hal tersebut menjadi fakta sejarah dan merupakan informasi valid bagi dunia internasional atas kekejaman Jepang, pemerintah Jepang melakukan tindakan yang membuat negara bekas koloninya melancarkan kritik keras yaitu melakukan pereduksian atau pengurangan sebagian isi buku catatan sejarahnya yang berisi tentang perlakuan ekstrim Jepang pada masa

perang dunia. Akan Tetapi, pemerintah Jepang melakukan hal tersebut berdasarkan alasan untuk melindungi moral masyarakat Jepang saat ini, dan juga dengan adanya keinginan merubah pandangan dan pola pikir masyarakat internasional terhadap tata cara kehidupan warga Jepang di masa lalu. Hal ini yang menjadi landasan pecahnya konflik atau hadirnya ketegangan antara Jepang dengan Cina.

Warga negara Cina tidak dapat menerima kebijakan Pemerintah Jepang atas pereduksian catatan sejarah tersebut, dikarekan oleh anggapan bahwa catatan sejarah tersebut sebagai bukti otentik yang mewakili perlakuan Jepang pada masa lalu. Selain itu, Terdapat pula konflik lain yang menjadi pemicu ketegangan di antara kedua negara ini, yaitu sengketa atas kepulauan Diaoyu atau Senkaku dan pengeksploraisian minyak bumi secara ilegal oleh Jepang didalam wilayah teritorial laut Cina.

Dalam menanggapi atas maraknya unjuk rasa anti Jepang yang terjadi di depan konsulat Jepang di Guandong dan Shenzhen, Pemerintah Jepang pun melakukan aksi pemanggilan terhadap Duta Besar Cina di Tokyo, melalui Menteri Luar Negeri Jepang Nobotaka Machimura yang, menuntut agar pemerintah Cina meminta maaf dan memberikan kompensasi atas insiden peleparan batu terhadap Kedubes dan rumah Dubes Jepang di Beijing. Jepang juga meminta Cina juga menjamin keselamatan warga dan pengusahanya yang berada di Cina.

Terlepas dari masalah ini, secara obyektif kehadiran Jepang sebagai payung di kawasan Asia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil membuat Jepang menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar dan donator bagi negara-negara yang sedang melakukan pembangunan atau tergabung dalam negara-negara berkembang.

Perkembangan hubungan bilateral Jepang – Cina pasca pereduksian catatan sejarah tersebut mengalami kemunduran dan hampir terjadi pemutusan hubungan diplomatik. Akan tetapi, ini malah membuat pemerintah Jepang dan Pemerintah Cina, memandang perlu suatu pertemuan formal yang membahas secara khusus mengenai kelangsungan hubungan bilateral mereka. Pertemuan antara kedua negara tersebut sempat terlaksana di Beijing, dan kedua negara ini menyetujui untuk melakukan perundingan kembali di masa yang akan datang. Disamping ini pula, kedua negara tersebut yakin bahwa dialog itu bersifat positif dan sepakat bahwa proses dialog ini harus dilanjutkan, demikian bunyi pernyataan Menteri Luar Negeri Cina¹. Keseriusan pemerintah Jepang dalam menyelesaikan masalah dengan Cina didasarkan pada tujuan dari kepentingan nasional mereka yaitu ingin mendapat dukungan untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hubungan bilateral antara Jepang dan Cina akankah merasakan sebuah ketidak harmonisan atau pengaruh negatif akibat dari pereduksian catatan sejarah tersebut.

¹ (<http://www.kompas.com/kompas.cetak/o5o4/12/opini/1676575.htm>), akses 27 Mei 2006, 21:44.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pembahasan mengenai diplomasi tidak terlepas dari kebijakan politik luar negeri suatu negara. Ini tidak dapat dielakkan sebab diplomasi sendiri merupakan upaya-upaya nyata dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Tidak terlepas dari itu, hubungan bilateral antara Jepang - Cina kembali diterpa prahara, pasca kasus pengeplorasian minyak bumi secara ilegal dilepas pantai Cina oleh Jepang, kembali mencuat kasus baru yaitu pereduksian catatan sejarah atas perilaku Jepang pada masa perang dunia ke-II.

Kebijakan pemerintah Jepang untuk mengeluarkan buku tentang perilaku Jepang pada masa perang dunia ke-II, ternyata menuai kecaman dari warga negara Cina. Hal ini disebabkan adanya pereduksian atau pengurangan sebagian besar perilaku Jepang pada saat menginvasi Cina pada masa perang dunia ke-II. Hubungan bilateral kedua negara ini berangsur baik setelah perdana menteri Jepang Mr. Junichiro Koizumi mengadakan pertemuan dengan Presiden Cina Hu Jintao di Jakarta bertepatan dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dan pada pertemuan ini, mereka membahas tentang langkah-langkah apa yang harus ditempuh dalam meredam konflik dua negara ini.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis membuat pertanyaan yang berhubungan dengan batasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Sejauhmana pengaruh reduksi catatan sejarah Jepang terhadap hubungan Jepang - Cina?
- b. Sejauhmana peranan diplomasi publik terhadap penyelesaian konflik Jepang - Cina?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan:

1. Menjelaskan pengaruh reduksi catatan sejarah Jepang terhadap hubungan kedua negara belakangan ini.
2. Menjelaskan alternatif penyelesaian konflik Jepang – Cina melalui jalan diplomasi publik.

b. Kegunaan penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi pemerhati masalah hubungan bilateral Jepang dan Cina.
2. Dapat menjadi menjadi bahan masukan untuk diskusi lebih lanjut dan pemberian informasi kepada para mahasiswa hubungan internasional khususnya yang berkaitan dengan hubungan bilateral Jepang dan Cina.

3. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah Indonesia dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut dalam melihat konflik kedua negara.

D. Kerangka Konseptual

Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan lazim disebut sebagai "*high politic*".² Hubungan bilateral antara negara adalah manifestasi dari pergaulan internasional atau interaksi internasional. Menurut konsep interaksi internasional yang didefinisikan oleh Brian Hocking dan Michael Smith adalah :

Interaksi internasional adalah proses-proses komunikasi dan proses-proses pertukaran yang berlangsung timbal balik antara aktor-aktor atau pelaku-pelaku dalam sistem internasional yang relevan secara politis³.

Seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara, baik yang bersifat kebijakan luar negeri maupun kebijakan dalam negeri merupakan pengejawantahan dari akar yang sama, yaitu pencapaian kepentingan nasional.

Para pemikir dan pengkaji fenomena-fenomena hubungan internasional sepakat bahwa justifikasi utama dari tindakan suatu negara adalah kepentingan

² T. May Rudy, *Hubungan Internasional Konemporr dan Masalah-Masalah Global*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, h.l.

³ Brian Hocking and Michael Smith, *World Politic : An Introduction to International Relation*, Great Britain, Harvester, 1990, h. 217 – 222.

nasional⁴. Kepentingan nasional ini meliputi berbagai dimensi yang saling terkait satu dengan yang lainnya, dan saling berkaitan secara sistematis dalam aplikasinya.

Kepentingan nasional juga merupakan dasar dari arah kebijakan politik luar negeri suatu negara, dimana diplomasi harus secara terus – menerus disesuaikan dengan prioritas kepentingan negara tersebut. Politik luar negeri suatu negara dapat dianggap berhasil, jika memiliki suatu strategi diplomasi tertentu yang secara efektif dapat melindungi pencapaian tujuan dan kepentingan nasional negara tersebut. Definsi kepentingan nasional ternyata hingga saat ini masih menghasilkan perdebatan ilmiah dengan sedikit kesepakatan mengenai definsi kepentingan nasional.

Menurut Kresner, kepentingan nasional adalah :

Semua tujuan yang ditentukan dan dirumuskan oleh negara merupakan kepentingan nasional. Dalam hal ini negara bertindak sebagai aktor otonom karena apa yang dimaksud dengan negara disini adalah para pembuat kebijakan⁵.

Plano dan Olton memaparkan bahwa kepentingan nasional itu adalah:

Kepentingan nasional merupakan konsesi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara, unsur tersebut mencakup kepentingan bangsa dan negara, kemerdekaan, kebutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kerjasama ekonomi.⁶

⁴ Theodore A. Columbus, *Internasional Relation : Power and Justice*, alih bahasa M. Marbun, CV Putra A Abardin, Bandung, 1990, h. 107.

⁵ Stephen D. Kresner, *Defendin the National Interest*, Priceton University Press, New Jersey, 1978, h.10.

⁶ Jack C. Plano dan Roy Olton, *loc. Ct*, h. 7.

Sumber konflik terletak di dalam hubungan antara sistem negara-negara kebangsaan itu sendiri, yang dilandasi oleh konsep “*egosentrisme*” yaitu aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hubungan dengan negara lain.⁷ Bilamana suatu negara terlalu berpegang teguh kepada universal atas kemerdekaan politiknya dan kebebasan memilih serta bertindak, ia akan menemui dilema, karena ia pun harus menghormati kebebasan dan kemerdekaan yang sama. Konflik seringkali terjadi akibat adanya benturan antara kepentingan dua belah pihak yang terlibat sengketa politik. Menurut A. Dahlan Nasution dalam bukunya Politik Internasional,

Konsep dan Teori menjelaskan “Persaingan, apakah lugas, semu atau berupa suatu potensi, adalah suatu hal yang normal dalam hubungan antar negara yang bermula dari perkembangan sistem negara kebangsaan”⁸.

Pertikaian antara negara sangat berpengaruh pada perubahan pandangan dunia internasional dalam menganalisa sejumlah konflik tersebut terjadi. Dunia internasional hanya dapat memberikan tanggapan dan saran bagaimana konflik atau pertikaian hanya dapat terselesaikan tanpa adanya benturan secara fisik apalagi melibatkan persenjataan atau militer.

Adapun argumentasi lain dalam hal penyelesaian konflik, Menurut Donal H. Weiss dalam bukunya Menyelesaikan Konflik Secara Bijaksana, adalah :

Konflik biasanya meluas karena ketidadaannya kesepakatan, tidak terbuka, tidak bersahabat, atau tidak kooperatif. Konflik melibatkan

⁷ Dahlan Nasution, *Politik Internasional : Konsep dan Teori*, Erlangga, Jakarta, 1991, h. 53-53

⁸ T. May Rudy, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

ketidaksepakatan tentang apa yang benar, baik, atau indah, tetapi berbeda dengan ketidaksepakatan yang sederhana dalam hal setidaknya satu orang percaya, benar, atau keliru bahwa haknya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya telah disangkal. Apa yang mungkin dimulai sebagai sebuah ketidaksepakatan sederhana berubah menjadi "kata-kata perang"⁹.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapat hasil penelitian yang optimal mengenai permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis memperhatikan beberapa hal berikut :

- **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah eksplanatif. Analisis eksplanatif adalah menggambarkan dan menjelaskan keadaan pereduksian catatan sejarah Jepang terhadap hubungan bilateral dengan Cina.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat telaah pustaka yakni, mengumpulkan data dari sejumlah literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam objek penelitian baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, ataupun artikel-artikel yang bersumber dari berbagai situs internet atau surat kabar. Data tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan seperti perpustakaan dan lembaga-lembaga yang terkait, yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Hasanuddin di Makassar.
- b. Perpustakaan Wilayah Makassar di Makassar.

⁹ Donald H. Weiss, *Menyelesaikan Konflik Secara Bijaksana*, Binapura, Aksara, 1994.

c. Konsulat Jenderal Jepang di Makassar.

- **Jenis Data**

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur. Adapun data yang sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini menyangkut pereduksian catatan sejarah Jepang terhadap hubungan bilateral dengan Cina. Dan pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan kedua negara tersebut.

- **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat kuantitatif. Yang menjadi pokok analisis adalah Pengaruh pereduksian catatan sejarah Jepang terhadap hubungan bilateral dengan Cina. Data yang bersifat kualitatif tentang kepentingan nasional Jepang dan Cina dalam penyelesaian konflik pereduksian catatan sejarah dimaksudkan untuk memperkuat analisis kuantitatif tentang penciptaan stabilitas keamanan regional kawasan Asia Tenggara.

berdaulat sehingga tidak mengancam suasana damai yang menjadi salah satu tujuan diplomasi. Perbedaan-perbedaan yang antara lain menyangkut ideologi, politik, sosial – budaya, keamanan maupun ekonomi yang berakces pada pecahnya konflik.

Disamping itu, istilah diplomasi ada kalanya diartikan sebagai suatu konsep perjuangan, yang mana berarti menjalankan suatu program perundingan. Akan tetapi pengertian diplomasi pada zaman dahulu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dalam menjalankan politik luar negeri dengan melepaskan pandangan apakah itu merugikan kepentingan negara lain atau tidak. Diplomasi pada zaman sekarang ini berbeda dengan diplomasi pada abad ke-17. Diplomasi itu berubah bentuknya dari masa ke masa dan sangat dipengaruhi oleh kemajuan peradaban ilmu pengetahuan dibidang teknologi, perubahan adat istiadat sesuai dengan perkembangan zaman, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Terlepas dari hal diatas, diplomasi merupakan produk suatu negara yang keberadaannya tidak muncul begitu saja. Diplomasi sangat berkaitan akan negara atau pemerintah yang berkuasa, kebijakan politik luar negeri, maupun tatanan dunia yang menjadi latarnya.

Diplomasi publik menjadi sebuah tren dalam hubungan internasional sejak tahun 1965, Dean Edmund Gullion bersama Edward. R Morrow menjadi pelopor dari diplomasi publik tersebut. Mereka menyatakan bahwa diplomasi publik

tersebut meliputi beragam aspek informasi seperti, televisi dan radio, jurnalistik, dan penelitian ilmiah.

Diplomasi publik ini bertujuan untuk mempromosikan kepentingan nasional suatu negara dengan menggunakan metode seperti, saling pengertian, pemberitahuan tentang informasi, dan usaha dalam pemberian pengaruh terhadap opini publik masyarakat internasional. Berdasarkan hal tersebut, diplomasi publik mempunyai tujuan yang sesungguhnya, yaitu memenangkan hati dan pikiran. Dalam tata pelaksanaannya, diplomasi publik bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah, namun seluruh aspek yang mempunyai kompetensi dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Atau dengan kata lain diplomasi tidak selamanya menjadi tugas seorang diplomat.

Diplomasi publik tidak dapat dipisahkan dari pengertian propaganda yang didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya. Namun, jika propaganda tidak didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai *disinformation*. Menurut Harold Nicholson ada dua teori diplomatik yang dapat dikemukakan yaitu teori Warrior dan teori Mercantile atau Shopkeeper. Teori yang pertama menggambarkan politik kekuatan dan sangat memperhatikan *prestise* nasional serta status nasional. Sedangkan teori yang kedua lebih memperhatikan dan memperlihatkan negosiasi diplomasi yang *profit politics* dan terutama bersifat *appeasement*, koalisi dan kompromi. Teori yang terakhir ini menganggap diplomasi sebagai usaha untuk menciptakan hubungan atau kontak

langsung secara bersahabat. Dewasa ini aktor-aktor internasional (negara-bangsa), cenderung lebih menerapkan *Mercantille* atau *Shopkeeper* dalam mengedepankan kepentingan nasionalnya. Penerapan teori *Warrior* lebih banyak menghasilkan pengucilan dan kecaman internasional.¹⁰

Dalam melakukan sebuah diplomasi yang mengatasnamakan tujuan pencapaian kepentingan nasional, maka para aktor yang melakukan praktek diplomasi tersebut harus memiliki pra syarat dalam melakukan diplomasi, yaitu :

a. *Persuasif*

Setiap aktor diplomasi harus mempunyai pendekatan-pendekatan yang harmonis dalam melakukan hubungan kerjasama tersebut.

b. *Believable*

Adanya usaha dalam menumbuhkan rasa saling percaya diantara dua aktor tersebut. Dengan mengemukakan transparansi tujuan dan kepentingan nasional mereka masing-masing.

c. *Credible*

Hal ini dapat juga diartikan adanya rasa saling menghargai dan percaya antara dua aktor yang saling berhubungan.

d. *Truthful*

Pernyataan atau kepentingan yang hendak disampaikan harus mempunyai nilai kebenaran yang tinggi, bukan sebuah wacana dan dapat

dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menumbuhkan rasa saling percaya diantara keduanya.

Dalam era globalisasi, diplomasi publik sangat berperan penting dalam melakukan berbagai pendekatan-pendekatan dan memberikan pengertian tentang isu-isu internasional yang mengglobal seperti, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, hubungan internasional yang mempunyai kompetensi dalam memberikan analisa tentang diplomasi tersebut, harus mempunyai proses interaktif, atau transformasi teknologi yang bersifat benar dan cepat.

Selanjutnya, peran Jepang dalam melakukan diplomasi publik, merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, mengingat makin maraknya sorotan dan komentar dari negara lain tentang pelaksanaan demokrasi dan pandangan terhadap isu-isu global. Menurut Rudy T.M, (tahun 2003) Pelaksanaan politik luar negeri sebuah negara merupakan cerminan dari politik domestik negara itu sendiri. Kompleksitas masalah yang dialami oleh Jepang, merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan pencairan solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah tersebut. Kompleksitas masalah tersebut, adalah :

- a. Meningkatnya korupsi
- b. Pemerintahan yang kurang konsisten
- c. Minimnya transparansi dari pemerintah
- d. Pertumbuhan ekonomi pasca reformasi



B. Kerjasama Bilateral Dalam Kerangka Hubungan Internasional.

Hubungan bilateral terselanggara sebagai akibat interaksi antar negara, hubungan bilateral antar bangsa di dunia modern ini terjadi karena tidak satu bangsapun dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan bangsa lain. Hubungan antar bangsa ini melibatkan antar subjek mempunyai bermacam jenis, dapat dilihat dari sifat hubungannya maupun ruang lingkup yang terjadi. Berdasarkan jumlah negaranya yaitu hubungan bilateral ini adalah hubungan yang di lakukan oleh dua negara, sedangkan hubungan multilateral dilakukan oleh lebih dari dua negara.

Di dalam dunia modern ini hubungan antar bangsa sudah tersebar diseluruh pelosok dunia, hubungan tersebut dimaksudkan untuk saling kerjasama dalam rangka mencapai tujuan nasional masing-masing. Karena suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain, begitu pula sebaliknya. Negara-negara dalam mengadakan hubungan bilateral itu mengandalkan diri dengan kemampuan nasional masing-masing, serta berusaha untuk menyelenggarakan politik luar negeri yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.

keuntungan yang lebih terutama dalam mewujudkan pencapaian kepentingan nasional dan tujuan internasional suatu negara.

Ada variable-variabel yang harus diperhatikan oleh suatu negara dalam melaksanakan hubungan bilateral. Yakni kondisi domestik dan situasi internasional. K. J. Holti dan M. Tahir Azhary (1988 : 22) memaparkan variable-variabel yang mesti diperhitungkan yakni:

- a. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
- b. Keterampilan mengarahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
- c. Kredibilitas ancaman serta gangguan.
- d. Derajat kebutuhan dan ketergantungan.
- e. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan.

Hubungan bilateral sesungguhnya mengandung dua pemaknaan, yakni konflik dan kerjasama. Kedua makna ini selalu silih berganti, menurut motivasi-motivasi internal dan opini internasional yang melingkupinya, serta kerjasama bilateral yang diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksud untuk mengatasi permasalahan diantara keduanya. Kerjasama bilateral meliputi beberapa dimensi seperti ideologi, politik, ekonomi, hukum, keamanan, dan budaya. Kerjasama bilateral pada dimensi ideologi adalah kerjasama internasional yang paling tidak berbentuk. Kerjasama universal, regional, maupun fungsional semuanya bertopeng pada negara sebagai faktor utama.

Kerjasama bilateral pada dimensi politik merupakan suatu kerjasama kesepakatan politik yang mengokohkan hubungan bilateral. Yakni kedua negara saling mengakui eksistensi wilayah. Pengakuan merupakan tindakan politik yang mempunyai konsekuensi hukum yang relevan pada situasi yang sesungguhnya. Jadi pengakuan itu penting bagi kerjasama bilateral ditinjau dari dimensi politik, karena hal ini menyangkut permulaan hubungan resmi antara kedua negara. Selain itu kerjasama politik mengandung arti bahwa kedua negara harus saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Hubungan bilateral Jepang – Cina yang berdimensi politik tidak harmonis atau terganggu oleh penerbitan buku sejarah masa kolonial Jepang di Cina dan pasca kunjungan Koizumi ke Kuil Yasukuni. Hal ini disebabkan sikap Jepang – Cina yang saling menyalahkan dalam menangani isu-isu sejarah secara benar. Selain itu ketegangan masih di tambah dengan sengketa sumber gas alam dilaut Cina timur. Hal ini menyebabkan hubungan bilateral kedua negara merosot pada titik terburuk dalam 30 tahun terakhir, setelah terjadi gelombang demonstrasi di Cina yang menganggap Jepang tidak mau menghadapi kenyataan sejarah.

Kerjasama bilateral dalam dimensi ekonomi, mempunyai peranan penting dalam menentukan keharmonisan hubungan kedua negara. Misalnya hubungan ekonomi antara kedua belah pihak berusaha membahas kemitraan ekonomi yang sudah berjalan dan mencapai volume transaksi perdagangan 178 miliar dolar di pengunjung tahun 2004. Sebagian besar perusahaan besar Jepang mencemaskan

tegangnya hubungan dengan Cina mitra dagang utama negara itu namun demikian mereka akan terus meningkatkan investasi disana.

Kerjasama bilateral ditinjau dari dimensi hukum dan keamanan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan keamanan kedua negara. Masalah-masalah keamanan bukan hanya soal pertahanan atau militer, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Dalam hubungan bilateral Jepang-Cina, sangat penting bagi kedua negara dalam mengadakan kerjasama keamanan, karena berdasarkan kenyataan bahwa Jepang-Cina adalah dua negara yang bertetangga dan berada dalam satu kawasan. Masalah-masalah keamanan regional maupun global memiliki dampak yang besar bagi kehidupan mereka sebagai negara yang bertetangga, sehingga mau tidak mau kedua negara harus mengadakan kerjasama bilateral yang erat dan sungguh-sungguh untuk menciptakan stabilitas keamanan regional. Hal ini disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik maupun global dapat berakibat pada hubungan Jepang-Cina dimasa mendatang.

C. Konflik dan Penyelesaian Konflik

a. Pengertian Konflik

Interaksi antar negara tidak jarang menimbulkan konflik. Beberapa pakar bahkan mengklasifikasikan konflik sebagai bagian dari interaksi antar negara dan oleh karena itu konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam hubungan internasional. Pendapat itu di dukung oleh Dahlan Nasution bahwa

konflik merupakan persaingan, apakah lugas, semu atau masih berupa sesuatu yang bersifat potensi adalah sesuatu yang normal dalam hubungan antar negara yang bermula dari sistem negara kebangsaan. Meskipun demikian, setiap konflik membutuhkan penyelesaian karena apa bila dibiarkan akan menjadi ancaman terhadap keamanan dan politik internasional.

Konflik merupakan aspek interinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi yang timbulkan dari perubahan sosial yang muncul berentangan dengan hambatan yang di wariskan. Namun cara kita menyelesaikan konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan atau mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan pilihan pilihan-pilihan tetap.

Istilah konflik seringkali menunjuk pada situasi dalam kelompok identitas dari manusia (apakah itu kesukuan, etnik, bahasa, agama, sosial, budaya, ekonomi, politik dsb), yang melakukan sesuatu secara sadar dalam keadaan bertentangan antara satu dengan yang lain kelompok identitas manusia untuk mengejar tujuan-tujuan tertentu.

Konflik adalah suatu interaksi yang melibatkan manusia, konflik lebih menunjukkan kebenaran dari pada suatu persaingan. Manusia dapat bersaing satu dengan yang lainnya sepanjang hal itu kurang memuaskan tanpa menyadari sepenuhnya keberadaan saingannya. Tingkat persaingan dalam

konflik terdapat pada suatu kelompok yang mencoba menghalangi pihak lainnya dari milik akhir yang diperoleh, dan tidak terlepas dari itu persaingan dapat saling menghancurkan satu sama lainnya.

Konflik dapat memaksa atau sebaliknya dalam pengertian kekuatan fisik, menguasai atau tidak memecahkan atau meleburkan sama sekali dari persoalan yang beraneka ragam. Konflik berasal dari ketegangan seperti yang sering diartikan dalam kekhawatiran, permusuhan, kecurigaan, penyimpangan kepentingan dan mungkin hasrat untuk mendominasi atau melakukan pembatasan. Hal tersebut tidak perlu diperpanjang sejauh mana sikap daya tangkap membatasi kenyataan berlebihan dari musuh dan saling berikhtiar untuk menghalangi satu dengan lainnya.

Morghenthau¹ memberikan penjelasan tentang konflik dengan mengemukakan karakteristiknya yaitu ketegangan dan sengketa. Hal itu dikemukakan sebagai berikut:

Pada pokok sengketa yang membawa resiko perang terdapat suatu ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan distribusi kekuasaan dan keinginan untuk menggulingkannya, keinginan-keinginan yang saling bertentangan ini, berdasarkan alasan-alasan yang telah dibicarakan, jarang dinyatakan dalam istilah-istilahnya sendiri akan tetapi ditulis dalam istilah moral dan hukum. Apa yang ditunjuk dalam pembicaraan mereka adalah konflik-konflik kekuasaan. Kami mengusulkan untuk menunjuk pada konflik-konflik kekuasaan yang belum diformulasikan sebagai "ketegangan" dan menyebut konflik-konflik yang diformulasikan dalam istilah hukum itu sebagai "sengketa".

¹ Morgenthau, H.J. 1991. *Politik Antar Bangsa*, Direvisi oleh J. Thompson, Buku III. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Konflik terjadi pada suatu kekuasaan yang...
konflik dapat berakhir yang dipersepsi...
dapat saling menghancurkan satu sama lainnya

Konflik dapat memaksa atau sebaliknya dalam penerapannya...
tidak menguasai atau tidak memecahkan atau melubangi...
persoalan yang beraneka ragam. Konflik berasal dari ketegangan...
sering diartikan dalam kekhawatiran, permusuhan, kecurigaan, penyimpangan...
kepentingan dan mungkin hasrat untuk mendominasi atau melakukan...
pembatasan. Hal tersebut tidak perlu diperpanjang sejauh mana sikap daya...
tanggap membatasi kenyataan berlebihan dari musuh dan saling berikhtir...
untuk menghalangi satu dengan lainnya.

Morghenthau¹ memberikan penjelasan tentang konflik dengan...
mengemukakan karakteristiknya yaitu ketegangan dan sengketa. Hal itu...
dikemukakan sebagai berikut:

Pada pokok sengketa yang membawa resiko perang terdapat suatu...
ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan distribusi kekuasaan...
dan keinginan untuk menggulingkannya, keinginan keinginan yang saling...
bertentangan ini, berdasarkan alasan-alasan yang telah dibicarakan, perang...
dinyatakan dalam istilah-istilahnya sendiri akan tetapi ditulis dalam istilah...
moral dan hukum. Apa yang ditunjuk dalam pembicaraan mereka adalah...
konflik-konflik kekuasaan. Kami mengusulkan untuk menaruh pada...
konflik-konflik kekuasaan yang belum diumumkan sebagai...
"ketegangan" dan menyebut konflik-konflik yang diumumkan dengan...
istilah hukum itu sebagai "sengketa".

¹ Morgenthau, H.J. 1993. *Politik Antara Bangsa: Dinamika dan Strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa, sebagai sifat konflik internasional, ketegangan dan sengketa selalu mendasari konflik-konflik internasional dan untuk menentukan apakah suatu konflik internasional bersifat ketegangan ataukah bersifat sengketa, indikator yang dipergunakan adalah telah diformulasikannya atau belum konflik-konflik kekuasaan tersebut kedalam istilah hukum.

b. Sumber-Sumber Terjadinya Konflik

Sebagian besar konflik disebabkan oleh banyak faktor, jarang ditentukan konflik dengan satu penyebab tunggal. Berbagai penyebab saling bercampur dan saling memperkuat munculnya konflik misalnya, revolusi Islam di Iran, muncul dari konflik yang berakar sosial dan politik, tetapi sesudah masuknya unsur agama, barulah massa bergerak dan aktif menentang Shah. Sumber-sumber konflik khususnya di dunia ketiga dapat digolongkan kedalam empat kategori pokok yakni : perpecahan bangsa, perkembangan yang timpang, bentrokan kultural, dan gerakan pembebasan.

- **Perpecahan Bangsa**

Konsep bangsa yang diintrodusir oleh kekuasaan kolonial atau oleh kelompok elit yang menganggapnya sebagai prasyarat untuk mencapai aspirasi politik mereka sendiri, diwujudkan dengan cara yang dalam banyak hal bertentangan tradisi toritorial, kesukuan, keagamaa, geografis,

atau sejarah kebudayaan. Di dunia ketiga, pembagian negara yang biasa dipaksakan dari luar, telah menyebabkan proses yang berjalan terus-menerus dimana keinginan nasional yang baru diciptakan itu bertentangan dengan struktur-struktur tradisional.

Perpecahan dalam negara bangsa yang baru lahir ini serupa dengan perpecahan geopolitik dunia ketiga itu sendiri. Minoritas etnis dan pembagian sekte-sekte adalah konsekuensi dari perkembangan ini, karena banyak konflik di antara negara dengan negara lain dan juga konflik-konflik domestik dalam negara-negara tertentu dalam pada khususnya menuntut otonomi.

- **Masalah Pembangunan**

Istilah pembangunan ini meliputi masalah yang bersifat ekonomi, sosial dan politik. Pada satu pihak pembangunan dunia ke tiga harus memenuhi kebutuhan ekonomi rakyatnya sedangkan pihak lain mereka tidak mampu melepaskan diri dari kebutuhan untuk mengejar nilai-nilai sosial politik dan tujuan-tujuan dan negara-negara industri. Jadi, Dunia Ke-tiga menjadi arena pergolakan dan ketidaksabaran yang menyebabkan pembaruan kekuasaan dan perjuangan politik, dan memperburuk konflik diantara ideologi-ideologi yang bersaing.

Banyak pula ketegangan dan konflik timbul dari ketidakmampuan elit berkuasa untuk memberikan perhatian yang layak kepada tuntutan

perseorangan, kelompok-kelompok sosial atau keagamaan, dan kesukuan untuk partisipasi yang besar dalam kehidupan politik. Tuntutan ini sendiri adalah akibat dari transformasi ekonomi sosial yang merupakan bagian dari industrialisasi.

- **Bentrok Kultural**

Faktor kebudayaan dapat pula mempengaruhi munculnya konflik. Proses modernisasi telah memaksakan berkembangnya kebudayaan dan peradaban barat yang menimbulkan penolakan dan bangsa dunia ketiga. Tujuannya adalah menghidupkan kembali kebudayaan asli dan menyesuaikan dengan kebudayaan negara modern. Dimensi konflik nampak melalui penolakan semua pengaruh dan kekuatan luar.

- **Gerakan Pembebasan**

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa gerakan pembebasan itu bertujuan meniadakan kerangka politik yang telah dibentuk selama zaman pemerintah kolonial. Gerakan pembebasan itu meliputi berbagai tujuan seperti pencapaian kemerdekaan, penumbangan pemerintah minoritas kulit putih, mengelakkan kesatuan nasional yang sekarang atau merangsang pergelakan yang bersifat revolusi sosial. Pergolakan sumber-sumber konflik menunjukkan bagaimana unsur-unsur konflik itu ada di dalam dan di antara banyak negara dunia ketiga.

Adapun penyebab konflik yang lain dikemukakan oleh Holsti dengan menyebutnya sebagai enam tipe utama tujuan negara, antara lain:

- a. *Konflik wilayah terbatas*, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada kepemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara di atau dekat wilayah negara lain. Usaha untuk memperoleh pembebasan yang lebih aman, seperti penaklukan Israel atas Dataran Tinggi Goland dan Semanjung Sinai pada tahun 1967, cukup lazim. Isu kedaulatan atas minoritas etnis sering berhubungan suatu negara untuk mengendalikan wilayah yang dikuasai oleh pihak lain dan arena itu, juga digolongkan dalam konflik wilayah terbatas.
- b. Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini sering mengandung nada tambahan ideologis yang kuat; maksudnya adalah menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintah yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan pihak yang melakukan intervensi.
- c. Konflik kehormatan nasional, dimana pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga. Beberapa negara mungkin meningkatkan insiden tertentu yang relative kecil menjadi suatu krisis penuh.

- d. Imperialisme regional, dimana suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologis keamanan dan perdagangan. Penyatuan Austria oleh Nazi Jerman pada tahun 1938 dapat dimasukkan dalam kategori ini.
- e. Konflik pembebasan, atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk "membebaskan" rakyat negara lain, biasanya karena alasan-alasan etnis atau ideologis.
- f. Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk mempersatukan negara yang terpecah. Vietnam merupakan suatu contoh yang menonjol dari penyebab konflik ini.

Berdasarkan penjelasan Holsti di atas nampak bahwa penyebab konflik adalah tujuan negara, karena suatu pemerintah harus berusaha mencapai tujuan negaranya meskipun itu bertentangan dengan kepentingan negara lain.

c. Cara Penyelesaian Konflik

Seperti telah dikemukakan pada awal pembahasan ini bahwa konflik internasional harus dicari cara penyelesaian demi kestabilan keamanan dan politik internasional, bagian ini akan membahas tentang cara-cara penyelesaian konflik. PBB mengatur cara-cara penyelesaian konflik dalam piagamnya pasal 33 sampai 38 yang mewajibkan para pihak dalam konflik atau penyelesaian yang mungkin mengancam perdamaian dan keamanan internasional untuk tunduk pada prosedur

tertentu bagi penyelesaian damai, apakah itu perundingan, pemeriksaan, mediasi, perdamaian, arbitrase, penyelesaian peradilan, usaha untuk menggunakan badan regional tertentu, atau cara lain yang dapat direncanakan para pihak. Tidak ada asumsi dalam Piagam PBB yang memperbolehkan penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan konflik, akan tetapi apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dan Dewan Keamanan menetapkan bahwa hal tersebut adalah ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi, maka Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan seperti senjata. Dalam praktiknya penyelesaian suatu konflik atau krisis internasional dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu :

- **Penyelesaian Konflik Secara Damai**

Dalam menghadapi konflik atau krisis internasional, maka penyelesaian secara damai dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk mengadakan pendekatan-pendekatan ke arah penyelesaian yang lebih bersahabat. Tanpa adanya kemauan politik dan pihak-pihak yang bertikai maka penyelesaian secara damai tidak mungkin dapat dilakukan. Adapun cara penyelesaian dengan jalan damai sebagai berikut:

- a. Perundingan (negosiasi)*

Negosiasi merupakan cara yang paling umum digunakan. Hal ini dapat dilakukan, bilamana ada inisiatif dari pihak-pihak yang

bersengketa untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan jalan berunding. Demi lancarnya perundingan maka sikap terbuka dan keobjektifan masing-masing pihak sangat diharapkan, agar para pihak yang terlibat konflik tidak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.

b. *Mediasi*

Mediasi adalah cara penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang fungsinya adalah memulihkan komunikasi di antara para pihak yang berselisih, mendinginkan suasana, menyelidiki keadaan di wilayah konflik, dan jika perlu memberikan berbagai jasa kepada para pihak terlibat konflik.

c. *Jasa-jasa baik*

Cara penyelesaian konflik dengan jasa-jasa baik hampir sama dengan mediasi, yaitu adanya pihak ketiga yang berperan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperan untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di dalamnya tanpa harus terlibat langsung menghadiri perundingan antara pihak-pihak yang bertikai tersebut. Perbedaannya dengan mediasi adalah pada cara mediasi pihak ketiga yang bersengketa sedemikian rupa, meskipun saran-sarannya tidak mengikat.

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang sering digunakan oleh PBB, organisasi regional, bahkan oleh suatu negara untuk membantu pihak yang bertikai mencari jalan keluar. Metode ini sebenarnya tidak tercantum di dalam Piagam PBB. Pada metode ini yang melibatkan pihak ketiga yang bertindak membawa kearah negosiasi atau memberi fasilitas kearah terselenggaranya negosiasi, dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai sengketa yang bersangkutan. Jasa-jasa baik akan terjadi apabila pihak ketiga mencoba memuji pihak yang bersengketa untuk melakukan negosiasi sendiri.

Penyelesaian regional adalah penyelesaian sengketa secara damai dengan mengusahakan jasa organisasi regional. Negara anggota PBB yang menjadi anggota organisasi regional diminta untuk tidak mengajukan sengketa yang timbul antara mereka ke Dewan Keamanan PBB, sebelum berusaha menyelesaikan melalui penyelesaian regional. Masing-masing organisasi internasional sudah memiliki pengaturan mengenai cara penyelesaian damai sengketa yang terjadi di negara-negara anggota.

d. *Konsiliasi (Perujukan)*

Dalam arti luas konsiliasi mencakup berbagai metode untuk menyelesaikan konflik atau sengketa internasional secara damai,

dengan bantuan lain atau badan penyelidik yang berdiri netral. Sedangkan dalam arti sempit berarti pengajuan bersengketa kepada komite atau komisi untuk membuat laporan dengan usul-usul yang sifatnya tidak mengikat. Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi ditandai dengan adanya komisi khusus yang bertugas mengadakan penyelidikan terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dipersengketakan dan menyerahkan metode-metode penyelesaiannya.

- **Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan**

Seperti yang telah dikemukakan diatas, penyelesaian dengan cara kekerasan dilakukan apabila penyelesaian secara damai tidak dapat ditempuh. Cara-cara kekerasan yang dimaksud antara lain:

- a. Perang*

Tujuan perang adalah untuk menaklukan lawan dan menetapkan syarat-syarat penyelesaian yang harus di terima oleh pihak lawan. Dalam arti terbatas, perang merupakan sanksi terakhir dari hukum internasional. Asal perang itu dilakukan bukan sebagai tujuan akan tetapi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan hukum.

- b. Balas Dendam*

Cara ini dilakukan oleh suatu negara sebagai tindakan balas dendam terhadap sikap dan perilaku negara lain yang tidak bersahabat

Hal itu dilakukan oleh negara melalui tindakan personanon grata (pengusiran diplomat) masing-masing negara bersengketa

c. Blokade

Blokade adalah salah satu cara yang lazim digunakan pada suatu persengketaan untuk memaksa negara lawan yang di blokir perbatasannya agar menyetujui tuntutan yang memblokirnya. Aksi semacam ini dapat di pandang sebagai suatu tindakan demi mempermudah penyelesaian konflik atau krisis antar negara.

d. Intervensi

Intervensi merupakan salah satu cara penyelesaian konflik dan krisis internasional dalam bentuk kekerasan, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap wilayah kedaulatan negara lain secara sah. Intervensi disini diartikan tindakan mencampuri urusan dalam negara lain secara tidak sah bentuk dari intervensi seperti mengirimkan sejumlah tentara dengan tujuan-tujuan tertentu dapat untuk membantu pemerintah dari gangguan pemberontak untuk menggulingkan rezim pemerintahan yang berkuasa.

BAB III GAMBARAN UMUM KONFLIK JEPANG – CINA

A. Diplomasi Publik Jepang – Cina

Diplomasi publik antara Jepang dan Cina dimulai dari kebangkitan Asia yang bertahap dan masuknya negara-negara Asia tersebut dalam pergaulan internasional merupakan unsur ketiga yang menyegarkan perubahan dari diplomasi lama ke diplomasi terbuka. Sebelumnya, jauh sebelum pecahnya Perang Besar pada tahun 1914–1918, Jepang telah diperhitungkan sebagai faktor politik internasional di Timur Jauh. Meskipun masih terpecah dan lemah, Cina juga mulai mempunyai kepentingan yang makin besar dalam hubungan internasionalnya.¹

Diplomasi publik dalam penyelesaian Jepang – Cina untuk kepentingan nasional masing-masing negara menggunakan metode dan usaha dalam pemberian pengaruh terhadap opini publik masyarakat internasional. Sehingga dalam pelaksanaannya, diplomasi publik bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah, namun seluruh aspek yang mempunyai kompetensi dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Atau dengan kata lain diplomasi tidak selamanya menjadi tugas seorang diplomat.

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara yang berseteru ini diupayakan pula oleh masyarakat sipil dengan berbagai latar belakang seperti


¹ Roy, S.L. 1995. *Diplomasi*. Rajawali Press. Jakarta., Hal. 132..

mahasiswa dan masyarakat umum dengan melakukan aksi-aksi demonstran anti Jepang dengan melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas milik pemerintah dan swasta Jepang serta melakukan aksi-aksi yang sifatnya propaganda diantara kedua negara akibat penerbitan buku sejarah Jepang yang dianggap menghilangkan cerita kebiadaban tentara Jepang terhadap rakyat Cina di Nanjing pada bulan April 2005. Yang kemudian di balas oleh Jepang dengan kegiatan serupa, para media informasi (wartawan), sampai pada upaya para diplomat penting kedua negara tersebut dengan melakukan perundingan di Beijing pada Juli tahun 2005 untuk mengatasi ketegangan dalam hubungan yang berkaitan dengan tindakan Tokyo semasa perang, bahkan keduanya bertukar gagasan mengenai hubungan Cina – Jepang sekarang dan masalah menyangkut kepentingan bersama².

Setelah perang dingin (*cold war*) berakhir, Cina menjadi sebuah fenomenal yang eksotik dalam peta hubungan internasional. Sebagai negara besar (*great power*) baik dalam pengertian kuantitas penduduk, dan jumlah wilayah, maupun potensi dan pengaruhnya yang strategis dalam politik internasional, maka setiap tren perkembangan yang terjadi di Cina layak menyedot perhatian negara manapun.

Selama hampir empat dekade periode perang dingin, Cina telah membuktikan kepada dunia sebagai "*balancer*" yang strategis dalam politik

² <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0605/08/luu06.htm>. Akses 20 Sep 2006, 22:34.



internasional. Dan kini, dengan pertumbuhan ekonomi yang kian canggih, dengan kapabilitas diplomasi yang bertambah elegan, Cina menjadi salah satu unit politik dalam hubungan internasional yang sangat penting dan kian mustahil untuk diabaikan³. Puncak ketegangan hubungan diplomatik antara Jepang dan Cina terjadi dimasa Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Koizumi (2001 – 2006) yang selama masa jabatannya telah enam kali mengunjungi kuil Yazukuni dimana menurut Cina merupakan makam bagi ribuan tentara Jepang yang dianggap sebagai penjahat perang.

Upaya diplomasi untuk mencairkan ketegangan telah berulang kali dilakukan, sejak tahun 1999, tiga negara yang merasa “disakiti” akibat kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Jepang pada tahun 1930 – an, yaitu Cina dan Korea Selatan secara rutin setiap tahun melakukan pertemuan trilateral untuk membahas berbagai permasalahan politik internasional antara ketiga negara tersebut, termasuk buku pelajaran sejarah yang oleh Cina dan Korea dianggap menutupi kesalahan Jepang pada masa Perang Dunia II.

B. Konflik Jepang - Cina

Hubungan bilateral Jepang – Cina yang berdimensi politik kini tidak harmonis atau terganggu diakibatkan konflik yang permasalahannya berasal dari kunjungan PM Jepang Koizumi ke kuil Yasukuni. Kuil tersebut adalah tempat

³ Umar Suryadi Bakri, “Pasca Deng Xiaoping: Cina, Qua Vadis?”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal. 5 – 6

peringatan sekaligus makam 2,5 juta tentara Jepang serta 14 narapidana penjahat perang kelas A yang menginvasi sebagian daratan Cina pada tahun 1931 sampai dengan 1945 serta tentara yang menduduki semenanjung Korea pada tahun 1910 hingga tahun 1945.

Akibat invasi militer Jepang terhadap Cina tersebut telah mengakibatkan tewasnya sekitar 300 ribu rakyat Cina di Nanjing terdiri dari laki-laki, anak-anak, dan perempuan dan kasus pemerkosaan massal terhadap sekitar 200 ribu perempuan Nanjing pada tahun 1937⁴, bahkan Pengadilan kejahatan perang pada tahun 1948 mendapati serdadu Jepang membunuh sekitar 155.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, di Nanjing, yang sebelumnya dikenal dengan nama Nanking⁵.

Lawatan PM Jepang sebanyak enam kali selama masa pemerintahannya tersebut telah membangkitkan kenangan pahit warga Cina atas militerisme Jepang masa lalu karena bagi Cina, Kuil Yasukuni ini dianggap sebagai lambang kekejaman militer Jepang di masa lalu yang telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Cina. Masalah ini semakin rumit, diakibatkan beberapa masalah berikutnya seperti:

Pertama, pada bulan April tahun 2005, Kementerian Pendidikan Nasional Jepang mengeluarkan buku sejarah untuk diajarkan disekolah-sekolah di Jepang yang berjudul *A Common Book on the History of East Asian Countries*. Para

⁴ <http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id=2005042502135405>, Akses 27 Sep 2006, 23:22.

⁵ <http://www.kapanlagi.com/h/0000094779.html>, Akses 27 sep 2006, 23:47.

penulis buku sejarah yang kontroversial itu adalah para anggota organisasi bernama Masyarakat untuk Reformasi Buku Pelajaran Sejarah Jepang. Mereka adalah para akademisi nasionalis yang merasa sangat perihatin terhadap kondisi pengajaran sejarah di Jepang. Nobukatsu Fujioka, wakil ketua organisasi itu menjelaskan, hingga kini Jepang mengajarkan anak-anaknya sejarah yang sangat dipengaruhi oleh propaganda musuh musuh zaman perang yang belum terbukti kebenarannya. Dapat dibayangkan bagaimana anak-anak Jepang menjadi yakin bahwa nenek moyang mereka adalah para monster yang haus darah. Padahal, kenyataannya tidak ada bukti-bukti bahwa para penjahat perang Jepang lebih buruk dari para penjahat perang yang berasal dari bangsa-bangsa lain⁶. Bagi Cina, buku tersebut dianggap mengecilkan arti korban kebiadaban tentara Jepang selama masa kependudukannya.

Kedua, masalah sengketa laut Cina Timur. Hak eksploitasi gas di Laut Cina Timur yang berada di perbatasan antara Jepang dan Cina menjadi konflik tambahan yang semakin memperburuk hubungan kedua negara ini. Konflik berawal ketika Cina mulai pengeboran secara unilateral pada tahun 2003 dan Tokyo menuduh Negara itu telah menyedot gas yang merupakan wilayah Jepang. Kementerian Nakagawa memberikan ijin kepada Teikoku Oil Co.Ltd. dari Jepang untuk eksplorasi di kawasan yang tengah disengketakan, itu merupakan perusahaan pertama yang diberikan ijin. Cina segera memprotes langkah itu dan

⁶ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/01/ln/1715533.htm>, Akses 27 Sep 2006, 23:05.

juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Liu Jianchao mengatakan, keputusan tersebut akan merupakan suatu pelanggaran kedaulatan Cina dan akan mempertajam situasi Laut Cina Timur. Sebuah survey Jepang tahun 1999 memperkirakan ladang-ladang gas yang dipersengketakan tersebut mengandung 200 miliar meter kubik gas⁷.

Ketiga, masalah militer tidak luput pula menjadi konflik antara kedua negara bertikai. Pelukan Jepang atas rencana besar untuk meningkatkan pertahanan bersama dengan AS itu menandakan penerimaan Tokyo atas tanggung jawab militer yang meningkat serta keprihatinan mengenai ambisi Korea Utara dan Cina (dimana pada beberapa tahun terakhir pemerintah Cina meningkatkan anggaran militernya dan dianggap oleh Jepang tidak transparan serta kepemilikan senjata nuklir⁸). Cina terganggu setelah putaran pembicaraan AS – Jepang pada Februari tahun 2005 ketika dua sekutu itu mendaftarkan Taiwan sebagai keperihatinan keamanan bersama. Beijing mengklaim kedaulatan atas Taiwan, yang terpisah secara politik dari dataran sejak tahun 1949⁹.

Keempat, penentangan Cina atas usaha Jepang meraih kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Cina menentang setiap pembaruan yang akan menimbulkan perselisihan dalam keanggotaan PBB. Menurut juru bicara Qin Gang, pembaruan memerlukan konsultasi yang demokratis, diskusi yang luas dan

⁷ <http://www.kapanlagi.com/h/0000117819.html>, Akses 27 Sep 2006, 22:40.

⁸ <http://www.kapanlagi.com/h/0000095870.html>, akses 27 Sep 2006, 22:27.

⁹ <http://www.kapanlagi.com/h/0000089117.html>, Akses 27 Sep 2006, 21:56.

ditentukan berdasarkan kepekatan menyeluruh. Ia juga menambahkan bahwa pihak Cina menentang pemaksaan pemungutan suara soal rencana pembaruan. Pada September 2005, Jepang bersama Brazil, Jerman, dan India menarik draf resolusi untuk mendapatkan kursi tetap Dewan Keamanan PBB setelah empat negara itu memutuskan bahwa mereka tidak mendapat cukup dukungan di Sidang Umum PBB. Salah satu sebab kegagalan Jepang tersebut, karena usaha diplomasi Cina yang menggebu-gebu untuk mengagalkan rencana itu. Cina salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sebelumnya mengatakan bahwa Jepang seharusnya melakukan lebih banyak lagi usaha untuk bertobat atas agresinya pada era Perang Dunia II¹⁰.

Kelima, kasus bunuh diri seorang diplomat Jepang di Shanghai kembali memanasakan hubungan Tokyo - Beijing. Jepang mengatakan, diplomat itu bunuh diri setelah dia diperas oleh agen-agen keamanan Cina mengenai hubungannya dengan seorang pramuria karaoke, sedangkan Cina menyebut pernyataan itu "keji" dan tak berdasar. "Cina harus bersiap menghadapi konflik dengan Jepang yang berkepanjangan dan menggunakan nasionalisme sebagai sebuah sumber persatuan social," menurut seorang komentator Partai Komunis Cina atau PKC. Komentar keras yang tidak biasanya itu diberikan pada saat memburuknya

¹⁰ <http://www.kapanlagi.com/h/0000096411.html>, Akses 29 sep 2006, 00:30.

hubungan antara Beijing dan Tokyo kali ini mengenai bunuh diri seorang diplomat Jepang di Shanghai bulan Mei 2004¹¹.

Keenam, adalah masalah pulau Diaoyu. Pulau tersebut terletak kira-kira 92 mil di sebelah timur kota Khilong, Propinsi Taiwan (Cina), merupakan kepulauan yuridiksi Pulau Taiwan. Pulau Diaoyu sejak dahulu adalah wilayah Cina, dan sama seperti Taiwan yang merupakan bagian yang terpisahkan dari wilayah Cina. Cina mempunyai kedaulatan yang terbantahkan terhadap kepulauan Diaoyu dan perairan di sekitarnya. Pendirian Cina itu mempunyai bukti sejarah dan hukum. Bulan Desember tahun 1943, Cina, AS dan Inggris dalam deklarasi Kairo menetapkan wilayah-wilayah Cina termasuk daerah timur laut, Taiwan dan kepulauan Penghu yang dirampas Jepang harus dikembalikan kepada Cina. Komunike Botsdam tahun 1945 menetapkan, syarat deklarasi Kairo harus dilaksanakan¹². Pada bulan Agustus pada tahun itu juga Jepang menerima komunike Botsdam dan mengumumkan menyerah tanpa syarat, ini berarti Jepang mengembalikan kepada Cina Pulau Taiwan serta yuridiksinya Kepulauan Diaoyu. Menurut Farid Ibrahim (Analisis Media pada *the Private Editors*, Tokyo) bahwa apa yang ditampilkan di museum Kuil Yasukuni adalah sejarah kemiliteran Jepang tanpa menggambarkan akibat yang ditimbulkan oleh setiap perang. Misalnya, potret romusa dalam suatu kerja paksa di Semenanjung Malaya, di Jawa

¹¹ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/04/ln/2339402.htm>, Akses 27 Sep 2006, 22:17.

¹² Kamus Politik, 2002 hal. 285

"Kerjasama Prakmatis merupakan bentuk kerjasama yang bersifat praktis dan berguna bagi umum"

atau ditempat lainnya. Juga tak ada imej atau dokumentasi mengenai penderitaan rakyat Cina dan negara-negara Asia lainnya.¹³

Hubungan Jepang – Cina sekarang tercatat paling buruk selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Namun, jangan dilupa sekalipun di permukaan yang tampak jelas hanya ketidaksepahaman mengenai buku sejarah, kunjungan ke Kuil Yasukuni, sengketa wilayah cadangan gas alam, dan masalah lainnya, sesungguhnya rivalitas dua raksasa Asia itu juga tidak terlepas dari persaingan ekonomi dan prestise. Dalam bidang keamanan, tampaknya Cina tidak senang pada upaya Jepang untuk berperan sebagai “polisi Asia” guna menunjang pertumbuhan ekonominya. Kedua negara itu sama-sama tergantung pada minyak impor, dan untuk mengamankan suplai minyak bagi kepentingan masa depan, keduanya telah melakukan langkah-langkah diplomasi yang intens hingga menjangkau ke Iran dan Afrika. Friksi tentu saja bakal terjadi¹⁴.

Inisiatif Jepang yang diumumkan dua bulan setelah para pemimpin ASEAN sepakat dengan PM Cina untuk menandatangani perjanjian kawasan bebas, telah menunjukkan kekhawatiran Jepang atas menurunnya pengaruh Jepang di ASEAN sebagai akibat meningkatnya dialog antara ASEAN dengan Cina. Dengan demikian maju dan kuatnya perekonomian Cina, Jepang sangat khawatir akan kehilangan status kepemimpinannya dalam dinamika perekonomian di kawasan Asia. Sejak berakhirnya PD II melalui paradigma angsa terbang” (*flying*

¹³ Kompas, 20 April 2005

¹⁴ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/27/opi02.htm>, akses 29 Sep 2006, 23:29.

geese). Jepang telah menjadi pemimpin kemajuan industri dan pertumbuhan ekonomi Asia. Namun, sejak terjadi krisis keuangan di Asia pada tahun 1997, kepemimpinan Jepang mulai menurun.

Krisis ekonomi dalam negeri Jepang yang berkepanjangan telah menghambat kemampuan Jepang untuk memainkan peranan pemimpin pergerakan ekonomi di kawasan secara maksimal. Sementara itu, dengan pesatnya kemajuan dari tingkat pertumbuhan ekonominya yang fenomenal, Cina mulai memosisikan diri sebagai "pemimpin" perkembangan ekonomi di kawasan. Negara ini telah menjadi negara pengekspor ke-4 terbesar di dunia dan menyerap hampir sepertiga dari total investasi asing yang ditujukan ke negara-negara berkembang. Apalagi perkembangan ekonomi Cina terus berlangsung seperti saat ini, maka banyak ahli berpendapat bahwa pengambil-alihan kepemimpinan pembangunan ekonomi di kawasan dari Jepang kepada Cina hanya menunggu waktu saja.

Jadi, yang harus di pahami adalah ketegangan Jepang – Cina tidak melulu berakar dari isu sejarah. Orang dapat dengan jelas mencium aroma perebutan pengaruh di Asia. Sebagai negara terbesar kedua (setelah Amerika Serikat) dalam bidang ekonomi, Jepang tumbuh menjadi negara paling dominan di kawasan Asia. Namun, pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat sejak tahun 1980-an, membuat negara itu menjadi pesaing kuat Jepang. Cina dengan penduduk 1,6 miliar jiwa adalah pasar hebat. Menurut Lin Zhibo, wakil direktur rubrik tajuk rencana

Harian Rakyat, corong partai berkuasa, mengatakan, konflik mendasar antara Jepang – Cina kini karena Cina sedang bangkit, dan Jepang tidak ingin melihat Cina bangkit¹⁵.

Terlebih lagi kini diantara kaum muda Cina juga muncul kesadaran, betapa merekalah sesungguhnya yang paling berhak menjadi superpower di dunia. Alasannya, Cina tidak saja mempunyai penduduk terbesar, tetapi juga mempunyai sejarah peradaban yang tua. Karena itu, hal-hal yang menyangkut harga diri menjadi amatlah penting bagi rakyat Cina. Tuntutan merevisi sejarah yang telah sangat melukai rakyat Cina dan permintaan maaf pemerintah Jepang atas perilakunya yang kejam di masa lalu karena invasi militernya yang telah menewaskan dan melukai ratusan ribu rakyat Cina serta kasus pemerkosaan wanita-wanita Cina oleh tentara Jepang yang pada tahun 1930-an di Nanjing adalah bagian dari menegakkan harga diri itu.

C. Hubungan Jepang – Cina di Tengah Konflik Reduksi Catatan Sejarah

Kunjungan Presiden Ricard Nilxon (Presiden AS ke 37) ke Beijing (Cina) yang menandai perbaikan hubungan AS-Cina telah memberikan dampak positif terhadap hubungan Jepang - Cina yang selama 40 tahun dilanda permusuhan hebat. Drama bersejarah ini dimulai ketika PM Jepang, Kakuei Tanaka dan PM Chou Enlai dengan disaksikan ketua Mao Ze Dong, mereka sepakat untuk mengubur *antagonisme* pahit masa lalu, serta mengakhiri permusuhan di antara kedua negara. Tanaka dan Chou membubuhkan tanda tangan mereka diatas

¹⁵ <http://www.kapanlagi.com/h/0000097071.html>, akses 7 Sep 2006, 00:38.

sebuah komunike dan secara resmi dibukanya hubungan diplomatik Tokyo dan Beijing dan berjanji akan selalu bekerjasama selamanya. Pada tanggal 25 September 1972, Kakue Tanaka berkunjung ke Cina dan pada tanggal 29 di bulan yang sama, pemerintah Jepang dan Cina mengemukakan deklarasi bersama tentang realisasi dari normalisasi hubungan Jepang – Cina.

Perubahan penting di Cina dengan terjadinya pergantian pemimpin kekuasaan dari golongan radikal revolusioner kepada golongan realispragmatis sesudah meninggalnya Mao yang kemudian disusul dengan tersingkirnya kelompok empat telah membuka satu lembaran baru di Cina. Lembaran itu adalah ditempuhnya moderenisasi baik secara politik maupun ekonomi. Moderenisasi ini mendorong Cina untuk membuka diri secara internasional dan ini telah menjadi satu hal yang mau tidak mau harus di tempuh Cina. Kesempatan itulah yang menjadi alasan dasar bagi *follow up Komunike Shanghai 1972* dengan AS dan Jepang, Eropa Barat dan negara-negara non-komunis lainnya. Momen inilah yang menjadi awal peletakan pertama kerjasama bilateral Jepang – Cina.

Hubungan kedua negara ini saling memelihara momentum perkembangan dan kerjasama pragmatis kedua negara di berbagai bidang mencapai hasil yang positif¹⁶. Berpangkal dari kebutuhan Jepang sendiri untuk mendukung strategi keamanan menyeluruh yang dibutuhkan bahan dasar dan bahan bakar, bantuan pun mengalir ke Cina. Dalam "Persetujuan Perdamaian dan Persahabatan Jepang

¹⁶ Marbun, 2002, Kamus Politik, 2002 hal. 450

- Cina" tahun 1978, Cina menerima bantuan perlengkapan dan teknologi sebesar 20 miliar dolar AS untuk jangka waktu delapan tahun. Sejak dibukanya hubungan diplomatik tahun 1972 tersebut, telah dicatat beberapa kemajuan. Bantuan Jepang lainnya adalah paket bantuan ekonomi 1979 - 1983 sebesar 300 miliar yen yang ditandatangani pada kunjungan PM Suzuki ke Beijing tahun 1982 untuk prasarana jalan kereta api, pelabuhan, dan pembangkit tenaga listrik.

Bantuan kedua untuk tujuh tahun berikutnya disepakati dalam kunjungan PM Yasuhiro Nasasone ke Cina pada Maret 1984 yaitu sebesar 460 miliar yen. Selain itu, untuk tahun 1979 - 1983 Cina juga menerima bantuan pinjaman bank swasta Jepang sebesar 2 miliar dolar AS untuk pertambangan batu bara dan minyak bumi. Jepang juga menyetujui untuk membantu dan membangun perlengkapan nuklir untuk tenaga nuklir Cina yang pertama di Qingshan di bagian tengah Cina yang berkapasitas 300.000 Kwh sebagai bagian dari rencana pembangunan 20 stasiun pembangkit tenaga nuklir yang berkekuatan 10 juta Kwh sampai tahun 2000. Beberapa proyek seperti pembangunan ladang minyak di Bohai dan Laut kuning, Jepang menyumbang 400 juta dolar AS dan pembangunan pabrik baja di Baoshan yang tertunda akibat peninjauan kembali ekonomi Cina diteruskan kembali dan Jepang menanamkan 3,4 miliar dolar AS yang sebagian berasal dari firma swasta Jepang¹⁷.

¹⁷ Syamsi, P, 2004. Empat Belas Tahun Hubungan Cina - Jepang, Hal 83.

Di bidang perdagangan dari volume perdagangan sebesar 1,1 miliar dollar AS pada tahun 1972 kemudian ini meningkat menjadi 10 miliar dollar AS pada tahun 1982 dan meningkat lagi sebesar 12,8 % pada tahun 1984. ekspor Cina ke Jepang berjumlah 5.087 miliar dollar AS yang terdiri atas minyak bumi, batu bara, tekstil, dan gandum, sedangkan impor dari Jepang bernilai 4.913 miliar dollar AS meliputi pupuk, mesin-mesin industri, dan besi baja.

Dibidang ekonomi, Jepang - Cina saling menjadi mitra dagang yang penting ekspansi Jepang ke daratan Cina tidak terhindarkan karena kedekatan geografis. Jepang - Cina saling menjadi mitra dagang yang sangat penting. Cina yang pada awal kerjasama tersebut tercapai masih merupakan negara yang sedang berkembang, bantuan dana serta teknologi sangat dibutuhkan bagi kelangsungan program modernisasinya yang meliputi modernisasi dibidang pertanian, industri, pertahanan, dan ilmu pengetahuan.

Setelah normalisasi hubungan Jepang - Cina, kedua pihak telah membentuk hubungan kerjasama Iptek antar - pemerintah dan pada bulan Mei tahun 1980 menandatangani Persetujuan Kerjasama Iptek Jepang - Cina. Bagi Jepang, hal ini akan mendorong untuk berperan lebih besar di Cina mengingat potensinya yang kuat dalam teknologi, industri, ilmu pengetahuan serta Pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk memperluas daerah pasar bagi barang-barang hasil industrinya.

Jepang selama 10 tahun ini menjadi mitra dagang kedua terbesar bagi Cina dan merupakan pasar ekspor kedua terbesar pula bagi Jepang. Setidaknya ada beberapa pertimbangan Jepang dan Cina mengadakan kerjasama antara lain: *pertama*, adalah Jepang dan Cina mempunyai pandangan yang sama dalam menyikapi ancaman dari Uni Soviet. Sebagaimana halnya Cina yang sudah berseteru dengan Uni Soviet sudah lebih dari dua dasawarsa. Kemudian Cina mengajukan tiga syarat bagi pemulihan hubungan dengan Uni Soviet yaitu, meminta penarikan pasukan Uni Soviet dari perbatasannya dengan Cina, dan penarikan tentara Vietnam dari Kamboja, serta penarikan mundur tentara Uni Soviet dari Afganistan. Disisi lain hubungan bilateral Jepang-Uni Soviet terjadi pasang surut yang diakibatkan sengketa kedua negara atas empat pulau milik Jepang yang dianeksasi oleh Uni Soviet pada PD ke-II, Breznev berjanji akan mengembalikan ke empat pulau tersebut kepada PM Jepang Fukuda dalam kunjungannya ke Moskow tahun 1977, namun pada kenyataannya Uni Soviet memungkiri kenyataan tersebut. *Kedua*, Jepang dan Cina mempunyai misi yang sama dalam bidang ekonomi dengan cara melembagakan kerjasama ekonominya dengan negara-negara di ASEAN (kerjasama regional dibidang ekonomi). Ada tiga pertimbangan Jepang dan Cina melembagakan kerjasama ekonominya:

- Disebabkan meningkatnya saling ketergantungan diantara negara di kawasan. dalam hal ini negara-negara akan cenderung menurunkan

tarif bea masuk untuk memfasilitasi percepatan arus barang dagangannya guna menjaga tingkat pertumbuhan ekonominya.

- Upaya untuk mengadakan struktural sebagai akibat perubahan tatanan perekonomian internasional.
- Derasnya proses globalisasi ekonomi yang telah mengakibatkan semakin sulitnya negara-negara untuk menarik investasi asing dan menjaga daya saing produk-produk ekspornya.

Oleh karena itu negara-negara akan berusaha saling bekerjasama (melalui kerjasama regional) untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi.

Melalui gagasan diatas, Jepang ingin membangun hubungan ekonomi lebih dekat, dengan cara perjanjian dagang secara bilateral di masing-masing negara di kawasan Asia. Sebagai contoh keikutsertaan Jepang pada kerja sama regional seperti APEC, disebkan karena bentuk kerjasamanya bersifat transparansi. Di samping itu Jepang mengembangkan kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sementara itu, Cina dengan kebijakan ekonominya yang terbuka telah berhasil membangun ekonomi dan menjaga pertumbuhannya yang tetap tinggi dan telah bergabung dengan APEC dan WTO sebagai sarana untuk lebih memajukan ekonominya. Para pengamat ekonomi meyakini sebagian dari strategi Cina untuk memperkuat perekonomian dalam negerinya dengan cara pembentukan kawasan perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN.

Tanggal 6 Desember 1979, pemerintah Jepang – Cina menandatangani Persetujuan Pertukaran Kebudayaan Jepang yang menetapkan pengembangan pertukaran kedua negara di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan olah raga. Tetapi pada aspek lain, pereduksian buku catatan sejarah dan kunjungan PM Junichiro Koizumi secara berkala mengunjungi kuil Yasukuni kini merupakan masalah utama yang merintang hubungan diplomatik Jepang-Cina dewasa ini. Yang mana perlu ada pengkajian atau pembahasan lebih lanjut, karena masalah tersebut merupakan bumerang bagi kedua negara tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh Reduksi Catatan Sejarah Jepang Terhadap Hubungan Jepang – Cina.

Jepang dan Cina saat ini tengah berusaha memperbaiki kembali hubungan yang sempat rusak oleh berbagai konflik yang terjadi yang menyebabkan renggangnya hubungan kedua negara pasca kunjungan PM Koizumi yang berziarah ke Kuil Yazukuni, makam bagi ribuan tentara Jepang yang tewas pada perang Dunia II. Namun, dapat diramalkan bahwa ketegangan hubungan ini tidak akan dapat terselesaikan dalam waktu singkat karena keretakan sebetulnya terjadi bukan karena sengketa soal sejarah atau karena ambisi Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), tetapi karena keduanya berambisi menjadi negara paling berpengaruh di kawasan Asia Timur.

John Ruwich, kolumnis kantor berita *Reuters* yang dipublikasikan pada 20 April 2005¹, mengatakan “Meski dalam hari-hari terakhir ini Beijing maupun Tokyo telah mengambil langkah-langkah untuk meredam perselisihan, menurut para analis krisis, itu berakar pada perjuangan kedua pihak untuk mengembangkan pengaruh di Asia Timur. Para analis juga tidak melihat kemungkinan akan

¹ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/01/ln/1715533.htm>, , Akses 27 Sep 2006, 23:05

berakhirnya proses saling kecam dan saling hujat di antara kedua negara tetangga tersebut”.

Menurut June Teufel, guru besar ilmu politik dari Universitas Miami AS, juga melihat berbagai masalah yang muncul dalam krisis hubungan Jepang – Cina sebenarnya lebih merupakan gejala atau sindrom ketimbang penyebab terjadinya rasa permusuhan antara Cina dan Jepang. “Tidak akan ada penyelesaian. Apa yang terjadi hanya usaha meredakan penunjukkan rasa marah yang terlihat,” katanya.

Sejarah Cina yang panjang, yang secara mendasar merupakan suatu peradaban mandiri, mendorong Beijing untuk menganggap dirinya sebagai bangsa yang besar, dan dengan demikian memberikan keyakinan bahwa mereka pantas untuk memainkan peranan dunia yang mengemuka. Hal ini menyebabkan Cina tergantung pada kemampuan sendiri (*Innate Capacity*) untuk mencapai tujuan-tujuannya tanpa harus menerima bantuan dari pihak lain, dalam rangka melindungi nilai-nilai tradisionalnya dan menghindari kemungkinan pencemaran dari luar.²

Meskipun, Jepang dan Cina sejak renggangnya hubungan kedua negara tersebut selalu melakukan pertemuan baik dengan pejabat, tokoh politik, hingga tokoh Pemerintahan berkuasa (Perdana menteri serta wakilnya ataupun para menteri), namun sejak kepemimpinan Perdana Menteri Koizumi, pertemuan-

² Robert G. Sutter, *Politik Luar Negeri RRC*, (terjemahan, Rizal Sukma, Bandung : Abrdin, 1991, hal. 3.

pertemuan tersebut belum dapat menyelesaikan konflik yang ada. Tercatat sejak tahun 1999, tiga negara Asia Timur (Jepang, Cina, dan Korea Selatan) setiap tahunnya melakukan pertemuan trilateral guna membahas konflik-konflik akibat “warisan” invasi militer pada Perang Dunia II yang ditinggalkan oleh Jepang, serta membahas hubungan bilateral ekonomi maupun politik yang sedang berkembang di kawasan Asia Timur.

Menurut Syamsul Hadi, Direktur Eksekutif Center for International relations studies (SIReS) Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia³, meskipun Jepang dan Cina mempunyai nilai diplomasi yang tinggi, hubungan “mesra” antara Jepang dan Cina tidak dengan sendirinya terwujud, karena Abe ke Beijing beberapa saat setelah ia terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang yang baru menggantikan Konichiro Koizumi, sebelum, kunjungan terakhir perdana menteri Jepang ke Cina dilakukan oleh Konichiro Koizumi pada Oktober 2001. Sebelum pertemuan Jiang Zeming, presiden Cina saat itu, Koizumi mengunjungi tugu peringatan perlawanan rakyat Cina terhadap imperialis Jepang di Lugouqiao.

Ditempat itu, Koizumi menyatakan permohonan maaf dan empati yang dalam atas pengorbanan rakyat Cina akibat invasi Jepang pada era 1930-an. Sayangnya, langkah simpati Koizumi ini tidak diikuti dengan tindakan-tindakan nyata yang bernuansa “sejuk” dalam mempererat hubungan Jepang dengan Cina. Selama menjadi perdana menteri, tercatat sebanyak enam kali Koizumi

³ Kompas, 12 Oktober 2006

berkunjung ke kuil Yazukuni, yang merupakan tempat dimana banyak tertuduh penjahat perang Jepang dalam Perang Dunia II dimakamkan. Misalnya, pada bulan Oktober 2005, PM Koizumi tetap mengunjungi kuil Yazukuni setelah kampanye Jepang untuk duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dipatahkan Cina.

Menurut Qin Gang, salah seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Cina tetap menentang tawaran Jepang bagi kursi permanen Dewan Keamanan PBB kendati ada pembicaraan bilateral tentang masalah itu. Cina menentang setiap pembaharuan yang akan menimbulkan perselisihan dalam keanggotaan PBB. Pembaharuan memerlukan konsultasi yang demokratis, diskusi yang luas ditentukan berdasarkan kesempatan menyeluruh. Salah satu penyebab kegagalan Jepang tersebut adalah usaha diplomasi yang menggebu-gebu untuk mengagalkan rencana itu. Cina merupakan salah satu anggota tetap DK PBB, sebelumnya mengatakan bahwa Jepang seharusnya melakukan lebih banyak lagi usaha untuk bertaubat atas agresinya pada era Perang Dunia II.

Deputi Wakil Menteri Urusan Luar Negeri Jepang Masaharu Kono dan Wakil Menlu Cina Qiao Zonghui bertemu di Beijing dan sepakat untuk berbicara lebih jauh tentang ambisi Jepang untuk mendapatkan kursi tetap DK PBB. Pada bulan Oktober 2005, Menteri Luar Negeri Cina Li Zhaoxing mengatakan kepada

Wakil Menlu Jepang Shotaro Yachi bahwa Beijing akan meningkatkan dialog dengan Tokyo untuk menyelesaikan perselisihan tentang pembaruan di PBB.⁴

Partai komunis Cina diduga berada dibelakang aksi pengumpulan 24 juta tanda tangan penduduk Cina yang menolak kemungkinan keanggotaan Jepang dalam Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini kepemimpinan Partai Komunis Cina tampak memanfaatkan sentimen anti Jepang untuk memperbesar legitimasi politiknya dikalangan rakyat Cina.

Angin segar terhadap konflik antara Jepang – Cina mulai berhembus ketika pada awal Oktober 2006, Perdana Menteri Jepang terpilih menggantikan Koizumi, Shinzo Abe melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Cina. Kunjungan Abe ke Beijing menandai hubungan baru Jepang-Cina yang oleh Cina disebut sebagai kunjungan historis. Pada pertemuan dengan PM Cina Wen Jiabao, kedua belah pihak berharap dapat segera menyelesaikan persoalan terkait masa lalu kedua negara, juga masalah perbatasan dan perdagangan. Kedua sepakat untuk mengembangkan hubungan kerjasama bersahabat, dengan melayani kepentingan-kepentingan dasar rakyat kedua negara tersebut. Kerjasama Jepang – Cina untuk meningkatkan hubungan Jepang – Cina sejalan dengan tren dunia dan kebutuhan masyarakat di masing-masing negara tersebut.⁵

Kunjungan Abe ke Cina tersebut merupakan kunjungan perdana Menteri Jepang terbaru ke Cina sejak tahun 2001, sekaligus kunjungan luar negeri pertama

⁴ <http://www.kapanlagi.com/h/0000096411.html>, akses 27 Sep 2006, 00:45.

⁵ Kompas, 9 Oktober 2006

Abe sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Oleh banyak pengamat, kunjungan ini dimaknai sangat penting sebagai perhatian yang lebih besar dari pemimpin Jepang terhadap Asia karena biasanya Perdana Menteri Jepang yang baru melakukan kunjungan perdananya ke Amerika Serikat. Dari pertemuan itu, PM Jiabao meminta Abe untuk menangani masalah Yazukuni dengan sewajarnya sehingga tidak menjadi hambatan politik yang akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Perdana Menteri Abe menekankan pentingnya membangun bukan hanya ikatan pertemanan tetapi juga startegis, hubungan resiprokal antara kedua negara.

Meskipun, dalam hubungan politik kedua negara mengalami masa sulit, namun dalam kerjasama bidang ekonomi ternyata tetap rukun. Tercatat Cina telah menggantikan AS sebagai mitra dagang terbesar Jepang sejak tahun 2004. perdagangan Jepang – Cina, termasuk Hongkong, telah mencapai 212 miliar dolar AS pda tahun 2005.

Jepang dan Cina dalam menanamkan pengaruhnya di ASEAN melalui kerja sama yang lebih erat. Pada saat Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-8 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4-5 November 2002, para kepala Pemerintahan ASEAN dan Perdana Menteri Jepang sepakat menandatangani *Join Declaration On The Comprehensive Economic Partnerchip* kemudian para pemimpin ASEAN dan Perdana menteri Cina sepakat juga menandatangani *Framework Agreement On ASEAN-Cina Free Trade Agreeent*

(ACFTA). Sudah sangat jelas terlihat betapa ketatnya persaingan Jepang-Cina dalam rangka merangkul ASEAN untuk melembagakan kerangka kerja sama ekonomi regional .

Dengan kejadian ini banyak analisis meyakini bahwa Jepang dan Cina melembagakan kerjasama ekonomi regional itu lebih banyak didasarkan kepada kepentingan politik dari pada ekonomi. Kedua negara tersebut mempunyai sejarah konflik yang panjang dan keduanya beranggapan satu sama lain sebagai ancaman. Untuk itu kedua negara melihat ASEAN sebagai arena perebutan kepemimpinan pembangunan ekonomi kawasan. Meskipun persaingan cukup tajam, Jepang dan Cina memiliki hubungan perdagangan yang sangat erat. Jepang merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Cina. Pada tahun 2004 nilai ekspor Cina ke Jepang mencapai 73,5 miliar dollar AS, sementara nilai impornya mencapai 94,3 miliar dollar AS⁶.

Keikutsertaan Jepang pada kerjasama regional seperti APEC karena sifat kerjasama APEC tidak tertutup (*open regionalism*). Oleh karena itu, untuk menjaga komitmennya pada sistem perdagangan multilateral melalui WTO, saat ini Jepang mengembangkan pengaturan ekonomi bilateral seperti yang telah ditandatangani dengan Singapura dan perjanjian serupa sedang dikembangkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sementara itu, Cina dengan kebijakan ekonominya yang terbuka telah berhasil membangun ekonomi dan menjaga

⁶ AFP/AP/MUK – Kompas, 13 April 2005

pertumbuhan ekonomi Cina tetap tinggi dan telah menggunakan kesempatan bergabung dengan APEC dan WTO sebagai saran untuk lebih memajukan ekonominya. Pembentukan kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN yang diyakini para ahli sebagian dari strategi Cina untuk lebih memperkuat ekonomi dalam negerinya.

Setidaknya ada tiga pertimbangan yang mendorong Jepang dan Cina melembagakan kerjasama ekonominya dengan negara-negara ASEAN. Pertama, karena meningkatnya saling ketergantungan di antara negara di kawasan, dalam hal ini negara-negara akan cenderung menurunkan tarif bea masuk untuk memfasilitasi percepatan arus barang dagangannya guna menjaga tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertimbangan kedua, upaya untuk mengadakan perubahan struktural sebagai akibat berubahnya tatanan perekonomian internasional. Dan ketiga, yaitu derasnya proses globalisasi ekonomi yang telah mengakibatkan semakin sulitnya negara-negara untuk menarik investasi asing dan menjaga daya saing produk-produk ekspornya. Untuk itu, negara-negara akan berusaha saling mengadakan kerjasama melalui kerjasama regional untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi.

Meskipun, ada isu merebaknya Anti - Jepang di Cina pasca penerbitan buku sejarah Jepang, sebagian dari perusahaan berskala besar Jepang mencemaskan tegangnya hubungan dengan Cina, mitra dagang utama negara Matahari Terbit itu, namun demikian, mereka akan terus meningkatkan

investasinya di Cina. Kyodo News (Kantor Berita Jepang) mengemukakan bahwa 51 dari 95 perusahaan baja, mobil, kimia, ritel dan perusahaan besar lainnya yang di survei mengkhawatirkan hubungan bilateral yang tegang dapat mengganggu operasi mereka di Cina. Namun, hanya dua dari perusahaan itu mengatakan bisnis mereka di Cina telah mengalami gangguan akibat gesekan mengenai masa lalu Jepang semasa perang dan 3 perusahaan mengatakan mereka masih akan melakukan ekspansi di negara Tirai Bambu tersebut, menurut kantor berita tersebut.⁷

Hubungan Jepang – Cina terus memburuk dalam beberapa bulan belakangan ini di awal tahun 2005 antara Jepang dan Cina, menyusul perselisihan atas kontrol sumber daya energi yang langka dan percekcoakan mengenai warisan pendudukan Jepang pada tahun 1931 – 1945. Meski demikian, Cina pada tahun itu masih menjadi mitra dagang terbesar Jepang, menggeser Amerika Serikat, sementara perusahaan-perusahaan Jepang menikmati keuntungan dengan melimpahnya sumber buruh yang murah dan tumbuhnya pasar kelas menengah.

Kerjasama yang lainnya ditengah makin memanasnya hubungan Jepang – Cina adalah peningkatan efisiensi energi dan konservasi lingkungan pada bulan Juli 2006, ditengah makin meningkatnya permintaan energi Cina meningkat tajam sejalan dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi negara tirai bambu tersebut. Pada forum yang dihadiri oleh sekitar 800 pejabat Pemerintah, perwakilan bisnis dan

⁷ <http://www.geocity.com/berita-arsip/mei200/20050520.html>. akses 27 Sep 2006, 01:03.

akademisi dari ke dua negara, Jepang dan Cina menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai kerjasama peningkatan upaya penghematan energi di Cina dan kedua negara juga menandatangani dokumen mengenai kerjasama peningkatan energi, mencakup komitmen Jepang menerima seratus pejabat Cina dalam pelatihan konservasi di lembaga-lembaga Jepang selama lebih dari lima tahun. Menurut Menteri Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Jepang, Toshiro Nikai, bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Cina merupakan tertinggi di dunia dan permasalahan lingkungan seperti masalah pasir kuning dan hujan asam akan menjadi tantangan besar bagi kedua negara pada tahun-tahun mendatang serta akan memberikan manfaat bagi kedua negara tersebut. Ia juga menekankan pentingnya mengadakan kerjasama seperti itu mengingat ketegangan dalam hubungan politik bilateral menyusul kunjungan PM Jepang Junichiro Koizumi ke Yazukuni Shirine pada Oktober 2005 dan masalah eksplorasi gas di Laut Cina Timur.⁸

B. Peranan Diplomasi Publik Terhadap Penyelesaian Konflik Jepang – Cina.

Diplomasi publik antara Jepang dan Cina dimulai dari kebangkitan Asia yang bertahap dan masuknya negara-negara Asia tersebut dalam pergaulan internasional merupakan unsur ketiga yang menyegarkan perubahan dari diplomasi lama ke diplomasi terbuka. Sebelumnya, jauh sebelum pecahnya Perang Besar pada tahun 1914–1918, Jepang telah diperhitungkan sebagai faktor

⁸ <http://www.kapanlagi.com/h/0000117819.html>, 27 sep 2006, 22:41.

politik internasional di Timur Jauh. Meskipun masih terpecah dan lemah, Cina juga mulai mempunyai kepentingan yang makin besar dalam hubungan internasionalnya.⁹

Diplomasi publik dalam penyelesaian Jepang – Cina untuk kepentingan nasional masing-masing negara menggunakan metode dan usaha dalam pemberian pengaruh terhadap opini publik masyarakat internasional. Sehingga dalam pelaksanaannya, diplomasi publik bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah, namun seluruh aspek yang mempunyai kompetensi dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Atau dengan kata lain diplomasi tidak selamanya menjadi tugas seorang diplomat.

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara yang berseteru ini diupayakan pula oleh masyarakat sipil dengan berbagai latar belakang seperti mahasiswa dan masyarakat umum dengan melakukan aksi-aksi demonstran anti Jepang dengan melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas milik pemerintah dan swasta Jepang serta melakukan aksi-aksi yang sifatnya propaganda diantara kedua negara akibat penerbitan buku sejarah Jepang yang dianggap menghilangkan cerita kebiadaban tentara Jepang terhadap rakyat Cina di Nanjing pada bulan April 2005. Yang kemudian di balas oleh Jepang dengan kegiatan serupa, para media informasi (wartawan), sampai pada upaya para diplomat penting kedua negara tersebut dengan melakukan perundingan di Beijing pada Juli

⁹ Roy, S.L. 1995. Diplomasi. Rajawali Press. Jakarta., Hal. 132..

tahun 2005 untuk mengatasi ketegangan dalam hubungan yang berkaitan dengan tindakan Tokyo semasa perang, bahkan keduanya bertukar gagasan mengenai hubungan Cina – Jepang sekarang dan masalah menyangkut kepentingan bersama¹⁰.

Setelah perang dingin (*cold war*) berakhir, Cina menjadi sebuah fenomenal yang eksotik dalam peta hubungan internasional. Sebagai negara besar (*great power*) baik dalam pengertian kuantitas penduduk, dan jumlah wilayah, maupun potensi dan pengaruhnya yang strategis dalam politik internasional, maka setiap trend perkembangan yang terjadi di Cina layak menyedot perhatian negara manapun. Selama hampir empat dekade periode perang dingin, Cina telah membuktikan kepada dunia sebagai “*balancer*” yang strategis dalam politik internasional.

Dan kini, dengan pertumbuhan ekonomi yang kian canggih, dengan kapabilitas diplomasi yang bertambah elegan, Cina menjadi salah satu unit politik dalam hubungan internasional yang sangat penting dan kian mustahil untuk diabaikan¹¹. Puncak ketegangan hubungan diplomatik antara Jepang dan Cina terjadi dimasa Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Koizumi (2001 – 2006) yang selama masa jabatannya telah enam kali mengunjungi kuil Yazukuni dimana menurut Cina merupakan makam bagi ribuan tentara Jepang yang dianggap sebagai penjahat perang.

¹⁰ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0605/08/luu06.htm>. Akses 20 Sep 2006, 22:34.

¹¹ Umar Suryadi Bakri, “Pasca Deng Xiaoping: Cina. Qua Vadis?”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal. 5 – 6

Upaya diplomasi untuk mencairkan ketegangan telah berulang kali dilakukan, sejak tahun 1999, tiga negara yang merasa "disakiti" akibat kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Jepang pada tahun 1930 – an, yaitu Cina dan Korea Selatan secara rutin setiap tahun melakukan pertemuan trilateral untuk membahas berbagai permasalahan politik internasional antara ketiga negara tersebut, termasuk buku pelajaran sejarah yang oleh Cina dan Korea dianggap menutupi kesalahan Jepang pada masa Perang Dunia II.

Setelah lebih dari satu dasawarsa, kini dua negara yang diamuk permusuhan selama 40 tahun tersebut bertaut kembali dalam kesejajaran derajat. Walaupun Cina dianggap lebih senior karena Cina merupakan asal sumber dan nenek moyang budaya Jepang namun dalam zaman baru ini Cina mau tidak mau harus mengakui superioritas Jepang, dalam bidang teknologi dan industri. Pertautan kedua bangsa yang menandai suatu kerjasama antara sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kekuatan teknologi raksasa, tampaknya akan memberi satu perkembangan baru dalam dunia internasional di masa datang. Yang perlu diperhatikan, apakah kerjasama tersebut akan melahirkan persaingan baru antara keduanya dalam perebutan pengaruh di Asia atau kerjasama itu akan melahirkan suatu kekuatan raksasa yang oleh beberapa kalangan dikenal dengan istilah "Aliansi Kuning".

Bersama Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, Cina seharusnya bisa menjadi tulang punggung Asia menghadapi blok ekonomi maju lain, seperti Eropa

dan Amerika Utara. Dapat dibayangkan jika kedua negara itu bersatu. Kita tentu berharap KTT Asia Timur yang bakal digelar mampu memberikan makna yang lebih baik. Menurut René L. Pattiradjawane, terjadinya KTT Asia Timur akan membuka jalan ke sebuah blok kerjasama politik, ekonomi, dan perdagangan baru tanpa AS. Perkembangan politik global sekarang ini memang bergerak jauh meninggalkan AS yang bercita-cita sebagai satu-satunya kekuatan adidaya pasca Perang Dingin. Ini akan membuka kerjasama yang lebih erat antara Jepang dan Cina untuk menjadi kekuatan globalisasi di kawasan Asia dan mengeser dominasi AS di panggung ekonomi dunia.¹²

Sebagian besar negara-negara memanfaatkan kemampuan ekonominya bagi kepentingan hubungannya dengan negara-negara yang membutuhkan dana pembangunan. Terlihat bahwa masing-masing negara akan selalu mengaitkan penyaluran bantuannya sejajar dengan kepentingan geo-strategisnya : negara Eropa Barat mementingkan kawasan Eropa Timur, sementara Jepang lebih memperhatikan Cina sebagai kunci stabilitas di kawasan Asia. Seiring dengan semakin meningkatnya kemampuan mereka untuk menghimpun dana, akibat berkurangnya pengeluaran untuk kepentingan militer, negara-negara maju akan semakin memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk menjaga stabilitas di kawasan yang secara geo-politik menyangkut kepentingan strategisnya.

¹² <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/19/ln/2298599.htm>, akses 29 Sep 2006, 23:50.

Politik Luar Negeri Cina dipengaruhi oleh berbagai faktor yang merupakan gabungan dari berbagai kepentingan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kebijakan politik luar negeri tersebut sebagian adalah pertimbangan-pertimbangan pragmatis yang bisa dipahami, seperti pemimpin-pemimpin negara lainnya. Para pemimpin Cina berusaha memperoleh *Nation Power*, prestise internasional dan kesejahteraan ekonomi; dan dalam prosesnya memutuskan untuk memanfaatkan politik luar negeri demi meningkatkan reputasi personal dan membangun pengaruh politik di dalam negeri.

Tidak terkecuali Jepang. Sudah terlihat gejala semakin aktifnya Jepang dalam politik Internasional dengan memanfaatkan kekuatan ekonominya. Kecenderungan ini dikhawatirkan banyak pihak akan berbenturan dengan kepentingan negara maju lainnya, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan strategis masing-masing negara maju di kawasan tertentu. Perbentukan kepentingan sesama negara donor ini tidak akan mustahil akan menjurus kepada rivalitas politik dalam menanamkan pengaruh di berbagai kawasan. Jepang sendiri tampaknya tidak akan mengambil risiko konflik dengan negara donor lainnya hanya karena ingin memperluas pengaruh ke kawasan yang secara geopolitik kurang penting bagi kepentingan strategis ekonomi jangka panjangnya.

Oleh karena itu, dapat dimaklumi manakala tuntutan internasional akan pentingnya tanggung jawab bersama dalam pembangunan ekonomi negara berkembang semakin menguat dan manakala kekuatan ekonomi mulai

terefleksikan kedalam rivalitas politik, maka Jepang akan lebih memelihara pengaruh ekonominya melalui ODA (*Official Development Assistance*) di kawasan Asia sebagai kawasan penting bagi jalur perkonomiannya (Darmansjah Djumala dalam *Kebijakan ODA Jepang Pasca Perang Dingin : Antara Kepentingan Geo-Politik dan Opini Publik*. 2004: Hal. 72).

Kebijakan Pemerintah Jepang tentang isu kunjungan ke Kuil Yasukuni yang merupakan kunjungan tahunan PM Kaoizumi, yang semasa jabatannya (2001 – 2006) telah mengunjungi kuil tersebut sebanyak 6 kali, telah menimbulkan dampak yang sangat luas terutama terhadap masalah hubungan bilateral Jepang dan Cina serta hubungan terhadap negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bantarto bahwa: "Kalau Jepang tidak membatalkan atau menghapus kunjungan regulernya itu, akan sangat merugikan Jepang sendiri. Karena hubungan Jepang dan Cina banyak diwarnai oleh hubungan ekonomi, apalagi Cina telah menjadi kekuatan ekonomi besar yang diperhitungkan oleh Jepang. Kalau tetap seperti itu, bukan tidak mungkin ada dampak hubungan Jepang dan Cina, dan lebih merugikan Jepang dari pada Cina. Ini yang mungkin tidak diperlihatkan oleh PM Koizumi, tapi harus diperhatikan jika ingin menjaga hubungan ekonominya dengan baik".¹³

Meskipun demikian, Cina atau negara-negara yang tidak menyetujui kebijakan Jepang, tidak bisa begitu saja bersikap keras. Cina misalnya kini jelas

¹³ <http://id.Cinabroadcast.cn/1/2004/1/30/1@1935.html>. akses 3 Oktober 2006, 02:33.

tengah mengandalkan investasi asing sebagai pendorong perekonomiannya. Dan Jepang, adalah kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah Amerika Serikat, yang berperan besar bagi Cina. Cina tetap memerlukan, karena Jepang adalah kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia. Meskipun Cina juga akan menjadi kekuatan ekonomi kedua, tapi belum terwujud. Salah satu pendorong ekonomi Cina adalah investasi asing, dan Jepang menduduki posisi kedua dalam investasi ekonomi di Cina.

Peningkatan kekuatan militer antara kedua Jepang – Cina, dapat pula memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas kawasan Asia Timur. Sebagai dua negara yang menempati posisi strategis dalam hubungan internasional di regional Asia Timur, Jepang dan Cina dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan ini.

Meskipun, ada trauma akibat masa lalu akibat invasi militer Jepang di negara-negara di kawasan Asia Timur. Pra pemimpin di negara-negara Asia Timur masih dihantui oleh trauma keganasan pasukan Jepang dalam perang dunia II, sebagaimana juga oleh radikalisme prinsip-prinsip politik luar negeri Cina, sebelum Deng Xiao Ping menerapkan keterbukaan dalam bidang ekonomi dan politik bagi Cina. Potensi ancaman seperti inilah yang menyebabkan kemungkinan timbulnya dampak perimbangan kekuatan militer bagi Asia Timur serta keinginan Jepang maupun Cina untuk sama-sama memiliki keinginan untuk mewujudkan dirinya sebagai salah satu kekuatan militer penting di Asia Timur.

Perimbangan kekuatan militer mungkin akan mengarah pada perebutan hegemoni di kawasan Asia Timur.

Tetapi, kemungkinan itu bagi Jepang dipersulit dengan hambatan konstitusional, dimana dalam Undang-Undang Dasar Jepang yang disahkan pada tahun 1947 yang menyebutkan bahwa sebagai konsekuensi kekalahan dalam perang dunia II dari sekutu, Jepang harus menyerahkan sebagian wewenang pertahanan dan keamanannya pada dunia internasional. Jepang tidak diperbolehkan oleh konstitusinya sendiri untuk mengembangkan persediaan senjata sebagai alat penangkal (*deterrence*) bagi kemungkinan serangan dari luar.

Sementara bagi Cina sendiri, dengan program pengembangan ekonomi, membuat posisi Cina juga sulit kalau harus melupakan kepentingannya nasionalnya pada Jepang karena untuk membantu pertumbuhannya, Cina akan sangat membutuhkan kerjasama dengan negara tetangganya terutama Jepang. Saat ini Jepang merupakan negara kedua terbesar yang menanamkan investasinya ke Cina serta keunggulan Jepang dalam hal teknologi dan industri akan sangat membantu Cina untuk mengatasi permasalahan pembangunan dalam negerinya sendiri.

Kondisi aktual hubungan antara Jepang dan Cina seharusnya berada dalam keseimbangan yang strategis. Walaupun ditinjau dari sudut demografis dan geografis, Cina lebih unggul dibandingkan Jepang, namun dari sudut pandang ekonomi dan teknologi, Jepang jelas lebih unggul. Kemampuan komparasi antara kedua negara dalam hubungan bilateral mendorong dibukanya peluang-peluang

baru dalam mengembangkan sistem regional yang lebih dinamis dan mendukung tercapainya kesejahteraan bersama. Pada titik ini, instrumen militer dapat dikatakan hanya merupakan pelengkap dalam hubungan ekonomi dan politik yang lebih luas.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

- a. Pasang surut hubungan bilateral Jepang dengan Cina, merupakan salah satu akibat dari tindakan represif Jepang saat Perang Dunia II. Jepang melakukan berbagai tindakan intimidasi kepada rakyat yang menjadi koloninya, hal inilah yang menciptakan berbagai tanggapan negatif terhadap eksistensi Jepang dewasa ini. Cina sebagai negara yang pernah merasakan kekejaman penjajahan Jepang, tetap melakukan tindakan anti Jepang dan enggan memberikan respon positif terhadap usaha Jepang dalam melakukan penjajakan untuk memulihkan hubungan bilateral mereka.
- b. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam melakukan pemulihan citra di mata dunia internasional, menjadi bumerang bagi Jepang sendiri. Tindakan pemerintah Jepang yang merefleksikan realisasi dari kebijakan luar negeri mereka dengan mengunjungi kuil Yasukuni dan pereduksian catatan sejarah mereka, dianggap sebagai sebuah penghinaan oleh Cina. Hal ini didasarkan atas kecurangan Jepang yang mereduksi berbagai kejahatan mereka dalam melakukan penjajahan selama Perang Dunia II.

- c. Diplomasi publik yang menjadi tren dalam hubungan internasional dewasa ini, diyakini dapat meredakan ketegangan antar negara. Hubungan antar negara tidak lagi dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah, namun segala tingkatan atau jenjang dalam sebuah negara dapat melakukan hubungan dengan negara lain. Diplomasi publik ini, mempunyai tujuan yaitu menciptakan sebuah kondisi saling pengertian dan saling memahami antar kedua negara terhadap kepentingan-kepentingan mereka dalam melakukan sebuah hubungan bilateral. Hal ini berusaha diciptakan agar kepentingan nasional kedua negara tidak saling tumpang tindih yang berujung kepada terhambatnya penyelesaian atau hubungan bilateral kedua negara.

B. Kritik dan Saran

Konflik yang berkepanjangan antara Jepang dan Cina mengakibatkan kekawatiran akan terciptanya kondisi instabilitas keamanan kawasan Asia Timur pada umumnya dan instabilitas keamanan Asia pada umumnya. Oleh karena itu, Jepang diharapkan dapat menjalankan kepentingan nasionalnya dengan tidak melecehkan atau melakukan aksi yang dapat mengakibatkan respon negatif dari Cina.

Perimbangan kekuatan yang ketat antara Jepang dan Cina dapat menimbulkan timbulnya konflik komunal dalam konteks lain, yaitu dalam kerangka nasionalisme dan semangat kebangsaan. Dalam politik internasional,

ide-ide tentang nasionalisme seringkali dianggap sebagai suatu pendekatan yang tidak rasional, dimana suatu bangsa menunjukkan sentimen yang sangat sensitif terhadap keberadaan bangsanya sendiri. Hal ini pernah ditunjukkan oleh bangsa Jerman dalam Perang Dunia II, dengan semboyan yang terkenal "*deustschland ist ubber alles*". Sentimen seperti ini sangat potensial dalam komunitas lokal yang ada di kawasan Asia Timur, sehubungan dengan penguatan yang dilakukan oleh suatu bangsa (negara) di kawasan tersebut.

Dan merupakan sebuah momentum yang baik dalam meredakan konflik tersebut adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan baru Jepang diharapkan dapat menjadi sebuah kekuatan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bakri, U.S. 1996. *"Pasca Deng Xiaoping: Cina, Qua Vadis?"*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Columbus, T.A. 1990. *Internasional Relation : Power and Justice*, alih bahasa M. Marbun. CV Putra A Abardin, Bandung.

Djumala, D. 2004. *Kebijakan ODA Jepang Pasca Perang Dingin : Antara Kepentingan Geo – Politik dan Opini Publik*. Sinar Harapan, Bandung.

Hocking, B. dan Smith, M. 1990. *World Politic : An Introduction to International Relation*, Great Britain, Harvester.

Holsti, K.J dan Azhary, M.T. 1988. *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis*. Erlangga, Jakarta.

Jack C. Plano dan Roy Olton, loc. Ct, h. 7.

Kresner, S.D. 1978. *Defending the National Interest*. Priceton University Press, New Jersey.

Nasution, D. 1991. *Politik Internasional : Konsep dan Teori*, Erlangga, Jakarta.

Marbun. 2002. *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Morgenthao, H.J. 1991. *Politik Antar Bangsa*, Direvisi oleh J. Thompson, Buku III. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Plano, J. C dan Olton, R, loc.Ct

Roy, S.L. 1995. *Diplomasi*. Rajawali Press. Jakarta.

Rudy, T.M. 2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

_____. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*. PT Refika Aditama, Bandung.

Sutter, R.G. 1991. *Politik Luar Negeri RRC*, (terjemahan, Rizal Sukma). Abradin, Bandung.

Syamsy, P. 2004. *Empat Belas Tahun Hubungan China - Jepang*. PT. Prenhellindo, Jakarta.

Wirayuda, H. 2004. *Hubungan Internasional "Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia"*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Weiss, D.H. 1994. *Menyelesaikan Konflik Secara Bijaksana*. Binapura Aksara, Bandung.

Jurnal dan Surat Kabar :

Harian Kompas, 13 April 2005. Sebelum ke DK, Jepang Harus Akui Dulu Kesalahan.

Harian Kompas, 20 April 2005. Opini, "Kuil Yazukuni dan Sentimen Anti-Jepang."

Harian Kompas, 9 Oktober 2006. Kunjungan Historis Abe.

Harian Kompas, 12 Oktober 2006. Opini, Setelah Kunjungan Abe ke China.

Internet :

[Http://id.Cinabroadcast.cn/1/2004/1/30/1@1935.html](http://id.Cinabroadcast.cn/1/2004/1/30/1@1935.html).

<http://www.geocity.com/berita-arsip/mei200/20050520.html>.

<http://www.kapanlagi.com/h/0000094779.html>,

<http://www.kapanlagi.com/h/0000117819.html>

<http://www.kapanlagi.com/h/0000095870.html>.

<http://www.kapanlagi.com/h/0000089117.html>

<http://www.kapanlagi.com/h/0000097071.html>.